



**#bangga
melayani
bangsa**

LAPORAN

ANALISIS KEGIATAN STRATEGIS DALAM Mendukung Pencapaian
DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN
SEMESTER I TAHUN 2023



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SETDAPROVSU
TA. 2023**

**PROGRES REPORT KEGIATAN STRATEGIS DALAM
MENDUKUNG PENCAPAIAN DAN PRORITAS
PEMBANGUNAN**



Tim Penyusun:

- 1. Prof. Dr. Abdul Hamid K, M.Pd**
- 2. Dr. Ir, Hj. R. Sabrina, M.Si**
- 3. Dr. Azizul Kholis, SE, M.Si, CMA, CSRS**

**BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
SETDAPROVSU
TA. 2023**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, Laporan Kinerja pada 54 Kegiatan Strategis Daerah Dalam Mendukung Pencapaian 8 Program Prioritas Pembangunan Sumatera Utara Tahun 2023 dapat tersusun dengan baik. Buku ini didedikasikan sebagai wujud pentingnya pencapaian target-target pembangunan Provinsi Sumatera Utara melalui Kegiatan Strategis Daerah (KSD) dengan dukungan kolaborasi oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara.

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) serta meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, serta untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai tujuan instansi, pemerintah telah mengeluarkan berbagai panduan dan aturan yang menjadi dasar bagi pemerintah daerah, baik level provinsi maupun kabupaten/kota dalam melaksanakan kegiatan pemantauan dan evaluasi pembangunan di daerahnya, yaitu dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Pada Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 28 Tahun 2023 tentang tugas, fungsi, uraian tugas dan tata kerja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara, dinyatakan bahwa Biro Administrasi Pembangunan Setdaprovsu mempunyai tugas melakukan penyusunan dan pemberian fasilitasi pemberkasan pelaksanaan penataan urusan pemerintahan pembangunan daerah pada pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah, pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah, pelaporan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan hasil koordinasi, pembinaan, monitoring, pemantauan dan evaluasi, maka telah disusun program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Biro Administrasi Pembangunan Setdaprovsu melalui Program Kebijakan Administrasi Pembangunan yang tertuang dalam Kegiatan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Sub Kegiatan Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah.

Besar harapan kami, dalam penyusunan laporan Kinerja Progres Report Kegiatan Strategis Dalam Mendukung Pencapaian dan Proritas Pembangunan pada Biro Administrasi Pembangunan Setdaprovsu Tahun 2023 akan tetap berjalan pada tahun – tahun berikutnya.

Medan, 2023

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud dan Tujuan	3
1.3. Ruang Lingkup dan Sasaran Kegiatan	4
1.4. Luaran Kegiatan.....	4
BAB II LANDASAN TEORI	5
2.1. Dasar Hukum	5
2.2. Delapan Program Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Utara ...6	
2.2.1. Program Prioritas Pembangunan Peningkatan Dan Pemenuhan Akses Pendidikan	6
2.2.2. Program Prioritas Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	8
2.2.3. Program Prioritas Peningkatan Kesempatan Kerja dan Berusaha melalui penyediaan lapangan pekerjaan.....	10
2.2.4. Program Prioritas Peningkatan Daya Saing melalui Sektor Agraris.....	11
2.2.5. Program Prioritas Peningkatan Daya Saing melalui Sektor Pariwisata	13
2.2.6. Program Prioritas Peningkatan Kualitas Reformasi Birokrasi	14
2.2.7. Program Prioritas Peningkatan Sosial Kemasyarakatan dan Olah Raga	16
2.2.8. Program Prioritas Pembangunan Infrastruktur yang baik dan berwawasan lingkungan	17
BAB III METODE KAJIAN	22
3.1. Lokasi dan jadwal kegiatan	22
3.2. Jenis dan sumber data	22
3.3. Teknik analisis data	22
BAB IV DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA	23
4.1. Deskripsi Data	23
4.1.1. Capaian Hingga Juli 2023	23

4.1.2. Capaian Hingga September 2023	35
4.2. Analisis Data (Realisasi)	55
4.2.1. Capaian Program Prioritas Juli 2023	55
4.2.2. Capaian Progres Prioritas September 2023	60
4.3. Ketercapaian Program Prioritas	77
4.3.1. Capaian Semester I (Juli 2023)	77
4.3.2. Capaian Program Prioritas Semester ke II (s.d September 2023)	78
4.4. Matriks 54 Kegiatan Strategis Daerah pada Pencapaian 8 Program Prioritas Pembangunan Sumatera Utara Juni – September 2023.....	79
 BAB V KESIMPULAN.....	 87
5.1. Kesimpulan.....	87
5.2. Rekomendasi.....	87
 DAFTAR PUSTAKA.....	 88

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan daerah pada dasarnya adalah merupakan suatu proses perubahan yang dilakukan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana. Tujuan Pembangunan Daerah sendiri dimaksudkan untuk mengurangi disparitas atau ketimpangan pembangunan antar daerah/antar sub daerah/antar warga masyarakat (pemerataan dan keadilan); memberdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan; menciptakan atau menambah lapangan pekerjaan; meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat daerah; mempertahankan atau menjaga kelestarian sumber daya alam agar bermanfaat bagi generasi sekarang dan generasi masa datang (berkelanjutan). Dalam pelaksanaan pembangunan daerah, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Sumatera Utara tahun 2019-2023, mempunyai visi "Sumatera Utara Yang Maju, Aman dan Bermartabat". Perwujudan visi tersebut didukung oleh misi ke-2 yaitu "Mewujudkan Masyarakat Sumatera Utara Yang Bermartabat Dalam Politik dengan adanya pemerintahan yang bersih dan dicintai, tata kelola pemerintah yang baik, adil, terpercaya, politik yang beretika, masyarakat yang berwawasan kebangsaan, dan memiliki kohesi sosial yang kuat serta harmonis".

Untuk mewujudkan visi dan misi Provinsi Sumatera Utara dilakukan melalui program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara. Untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan, meningkatkan efisiensi dan efektivitas serta kesinambungan pelaksanaan pembangunan diperlukan evaluasi untuk menilai sudah sejauh mana tujuan dari Program dan Kegiatan yang sudah direncanakan terarah dalam pencapaian sasaran. Untuk itu dilakukan pengumpulan data secara periodik yang dihimpun untuk bahan analisis capaian kinerja pembangunan daerah melalui integrasi data-data monitoring pengendalian pembangunan pemerintah Provinsi Sumatera Utara sebagai pengguna dana APBD sebagai bahan

evaluasi dan monitoring Pemerintah Daerah untuk mengambil langkah kebijakan dengan cepat dan tepat.

Dan dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) serta meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, serta untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai tujuan instansi, pemerintah telah mengeluarkan berbagai panduan dan aturan yang menjadi dasar bagi pemerintah daerah, baik level provinsi maupun kabupaten/kota dalam melaksanakan kegiatan pemantauan dan evaluasi pembangunan di daerahnya, yaitu dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Pada Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 28 Tahun 2023 tentang tugas, fungsi, uraian tugas dan tata kerja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara, dinyatakan bahwa Biro Administrasi Pembangunan SetdaprovSU mempunyai tugas melakukan penyusunan dan pemberian fasilitasi pemberkasan pelaksanaan penataan urusan pemerintahan pembangunan daerah. maka telah disusun program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Biro Administrasi Pembangunan SetdaprovSU melalui Program Kebijakan Administrasi Pembangunan yang tertuang dalam Kegiatan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Sub Kegiatan Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah. Untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan program - program, meningkatkan efisiensi serta kesinambungan pelaksanaan pembangunan sangat diperlukan evaluasi untuk mengukur tercapai atau tidaknya tujuan dari Program dan Kegiatan yang sudah direncanakan dan agar lebih terarah dalam pencapaian sasaran, hal ini dapat terselenggara dengan baik apabila sistem pemantauan dan pelaporan pelaksanaannya dilakukan secara terus menerus dan tepat waktu.

Pembangunan infrastruktur dituntut untuk menghasilkan infrastruktur yang memiliki *performance* tinggi dan memegang peran penting dalam mendukung ketahanan pangan, perekonomian nasional serta kualitas hidup warga. Dalam

pelaksanaannya, akan dihadapi oleh masalah sosial, ekonomi dan lingkungan. Antara lain masalah pembebasan lahan, rendahnya penerimaan teknologi dan ketidaksiapan masyarakat terhadap rencana maupun hasil-hasil pembangunan.

Kebijakan dan strategi pembangunan infrastruktur di bidang sosial harus mampu mendorong partisipasi, menumbuhkan sikap penerimaan dan meningkatkan kesiapan masyarakat. Di sisi ekonomi harus mampu mendorong pertumbuhan Ekonomi dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Dari sisi lingkungan harus mampu mendorong peningkatan kualitas dan menjaga kelestarian lingkungan terhadap akses pembangunan infrastruktur maupun dampak negatif perubahan iklim.

“Pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan dilakukan untuk mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan sebagaimana tercantum dalam UU Penataan Ruang, selain itu pembangunan infrastruktur harus tetap pada koridor pembangunan berwawasan lingkungan (pro-environment), pertumbuhan ekonomi (pro-growth), pengentasan kemiskinan (pro-poor) dan pembukaan lapangan kerja (pro-job).

Dengan melakukan Analisis yang melibatkan Tenaga Ahli sebagai Tim yang diharapkan mampu melakukan Analisis yang bertujuan untuk memformulasi dan mengintegrasikan informasi pelaksanaan program dan kegiatan yang berbasiskan pada data yang berkenaan dengan pembangunan khususnya bidang infrastruktur

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan dari kegiatan ini adalah sebagai berikut :

- a. Mengevaluasi pencapaian target rencana program dan kegiatan strategis daerah
- b. Melaksanakan pengumpulan bahan capaian Kinerja Pembangunan Daerah;
- c. Melaksanakan pengolahan dan penyajian data Capaian Kinerja Pembangunan Daerah.

1.2 Tujuan

Sedangkan Tujuan dari kegiatan analisis adalah :

- a. Memberikan gambaran tentang realisasi capaian kinerja program

dan kegiatan prioritas daerah yang telah ditargetkan.

- b. Memberikan gambaran tentang realisasi penyerapan dana kegiatan yang dilaksanakan perangkat daerah yang ditetapkan dalam APBD Tahun 2023.
- c. Mengetahui hambatan/kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan sebagai dasar perumusan rekomendasi dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan.

1.3. Ruang Lingkup dan Sasaran Kegiatan

Ruang lingkup kegiatan ini meliputi analisis capaian kinerja pada aspek Infrastruktur Sedangkan Sasaran kegiatan ini adalah ditujukan bagi Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan masyarakat di Sumatera Utara

1.4. Luaran kegiatan

Luaran kegiatan ini adalah dokumen berupa buku laporan analisis capaian kinerja pembangunan daerah pada Pemerintah Provinsi di Sumatera Utara yang menjadi salah satu bahan dalam penyusunan pedoman dan rujukan dalam suatu kebijakan pemerintah.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

2.1. Dasar Hukum

Dasar Hukum dalam pelaksanaan Sub Kegiatan Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah adalah sebagai berikut:

1. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
4. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 Nomor 8);
5. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 30 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021 Nomor 30);
6. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 28 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera

Utara;

7. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 40 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara T.A. 2023.

2.2. Delapan Program Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Utara

2.2.1. Program Prioritas Pembangunan Peningkatan dan Pemenuhan Akses Pendidikan

Akses pendidikan merupakan segala kemudahan yang diberikan kepada setiap warga masyarakat untuk menggunakan kesempatannya untuk meraih pendidikan yang layak. Dalam UUD 1945 Pasal 31 Ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa warga negara berhak mendapat pendidikan. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Oleh karena itu, pendidikan harus bisa diakses dan dijangkau oleh semua warga negara, melampaui berbagai kendala seperti fisik, mental, jenis kelamin, ekonomi, geografis, dan sosial.

Didi Trisidi (2016) mengungkapkan bahwa akses pendidikan dapat berupa sikap sosial yang nondiskriminatif, kebijakan politik dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang mendukung dan mencegah diskriminasi, tersedianya lingkungan fisik pendidikan yang aksesibel, tersedianya alat bantu belajar/mengajar yang sesuai, dan biaya pendidikan yang terjangkau, yang memungkinkan setiap warga masyarakat menggunakan kesempatannya untuk mengikuti proses belajar/mengajar di program pendidikan yang dipilihnya.

Menurut Van Tudler (2014) mudahnya keterjangkauan pendidikan harus ditunjang oleh sejumlah faktor diantaranya sistem pendidikan yang mudah dijangkau, sarana dan prasarana yang mendukung, keamanan wilayah dan cara pandang sosial serta budaya setempat. Sementara itu, Alan Sánchez and Abhijeet Singh (2016) menganggap kemudahan akses pendidikan sangat dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu: a) Keterjangkauan wilayah geografis; b) Cara pandang orang tua akan pendidikan; dan c) Kesetaraan gender.

Pendidikan merupakan faktor kunci dalam pembangunan nasional di segala bidang, baik sosial, politik, ekonomi, budaya maupun moral (Pushpanadham, 2006). Peningkatan kualitas pendidikan akan memberikan multiplier effect terhadap komponen pembangunan bangsa yang lain. Pendidikan yang berkualitas akan mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia yang menjadi subyek sekaligus obyek dari pembangunan itu sendiri.

Dalam Sasaran prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023, yaitu prioritas pembangunannya berada pada peningkatan dan pemenuhan akses pendidikan. Program prioritas pembangunan bidang pendidikan Provinsi Sumatera Utara ditujukan untuk mengetahui realisasi capaian program prioritas pembangunan bidang pendidikan Provinsi Sumatera Utara.

Program prioritas pembangunan bidang peningkatan dan pemenuhan akses pendidikan Provinsi Sumatera Utara pada dasarnya adalah sebuah program yang dibuat dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan masyarakat daerah dengan menekankan pada sepuluh (10) indikator program prioritas yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, terhitung dari tahun 2020. Dalam menjalankan program prioritas pembangunan daerah di bidang pendidikan, strategi, kebijakan, serta kegiatan yang dilakukan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang ada di Provinsi Sumatera Utara. Dapat dilihat dari tabel Capaian indikator Prioritas Pembangunan Bidang Peningkatan dan Pemenuhan Akses Pendidikan Tahun 2020

Indikator	Target 2020	Realisasi 2020	Capaian
Angka Melek Huruf	99,38	99	99.80%
Rata-rata Lama Sekolah	9,97	9,5	97.18%
Harapan Lama Sekolah	13,81	13,4	97.64%
APK SM Sederajat	98,14	97,8	99.65%
APM SM Sederajat	73,19	72,3	99.19%
Nilai Rata-rata Ujian Nasional SM Sederajat	-	-	Ditiadakan
Persentase Guru SMA/LB berkualifikasi Akademik S1/D4	97	97	100.42%
Persentase Guru SMA/LB bersertifikasi	57,4	54,7	94.92%
Persentase Guru SMK berkualifikasi akademik S1/D4	94,72	94,72	99.88%
Persentase Guru SMK bersertifikasi	43,4	43	96.22%

Sumber: Hasil Mid Term Review RPJMDSU Tahun 2020

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat dijelaskan bahwa capaian indikator kinerja kunci (IKK) pada Dinas Pendidikan menunjukkan hanya ada 1 indikator

atau 10 persen yang telah mencapai target dan terdapat 9 indikator atau 90 persen yang belum tercapai target sesuai dengan RPJMD. Indikator yang tercapai adalah persentase guru SMA/LB berkualifikasi akademik S1/D4. Namun hal ini tidak berbanding lurus dengan peningkatan jumlah guru sehingga tidak dapat menutupi kebutuhan jumlah guru pada tingkat SMA/SMK di Sumatera Utara. Semestinya disamping peningkatan kualifikasi guru maka harus di selaraskan dengan pertumbuhan kebutuhannya. Indikator ini ditetapkan sebesar 97, ini merupakan target yang optimis dan dapat ditingkatkan untuk mendapatkan kesesuaian kualifikasi akademik guru sebagai bukti tercapainya target RPJMD.

Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) gubernur Sumatera Utara pada sektor pendidikan adalah angka rata-rata lama sekolah yang mana pada provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 terdapat sebesar 9,54 dengan tingkat capaian rata-rata sebesar 99,17%. Angka ini menunjukkan bahwa belum tercapai dan masih terdapat selisih sebesar 0,83%. Walaupun belum tercapai namun kinerja pada IKU angka rata-rata lama sekolah capaiannya cukup signifikan sehingga dapat dikatakan bahwa ketidaktercapaian yang dimaksud dibawah 1%. Namun masih perlu ditingkatkan. Jika dibandingkan dengan angka rata-rata lama sekolah dikawasan Sumatera, angka rata-rata lama sekolah Sumatera Utara berada pada urutan ke-4.

2.2.2. Program Prioritas Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat

Derajat kesehatan menurut teori Henrik L. Blum dipengaruhi oleh empat faktor utama yaitu: 1) lingkungan (environment), 2) keturunan (heredity), 3) pelayanan kesehatan (health care services), dan 4) perilaku (lifestyles/ behavior). Perilaku merupakan salah satu faktor yang menjadi fokus utama dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat (Durch, Bailey dan Stoto, 1997).

Hendrik L Blum mengatakan bahwa ada empat faktor yang mempengaruhi status kesehatan masyarakat, yaitu lingkungan, perilaku, pelayanan kesehatan, dan keturunan. Lingkungan mempunyai pengaruh peranan yang besar di ikuti perilaku, fasilitas kesehatan dan keturunan.

Lingkungan sangat bervariasi umumnya di golongan tiga kategori, yaitu:

yang berhubungan dengan aspek fisik misalnya: sampah, air, udara, tanah, iklim, perumahan dan sebagainya. Perilaku merupakan faktor kedua mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat, karena sehat tidaknya lingkungan individu, keluarga dan masyarakat sangat tergantung pada perilaku manusia itu sendiri, selain itu juga dipengaruhi oleh kebiasaan, adat istiadat, kepercayaan, pendidikan, sosial ekonomi dan perilaku-prilaku lain yang melekat pada dirinya (Nasrul, 1998).

Pelayanan kesehatan merupakan faktor ke tiga yang mempengaruhi kesehatan masyarakat, karena keberadaan fasilitas kesehatan sangat menentukan dalam pelayanan pemulihan kesehatan, pencegahan terhadap penyakit, pengobatan dan keperawatan serta kelompok dan masyarakat yang memerlukan pelayanan kesehatan. Ketersediaan fasilitas sangat dipengaruhi oleh lokasi, apakah dapat dijangkau masyarakat atau tidak. Faktor keturunan merupakan faktor yang telah ada dalam tubuh manusia yang di bawa sejak lahir, misalnya dalam penyakit keturunan diabetes melitus, asma bronkial dan sebagainya (Nasrul, 1998).

Derajat kesehatan masyarakat adalah gambaran tentang kondisi kesehatan yang terjadi secara umum di masyarakat. Situasi derajat kesehatan suatu kota dipaparkan dalam profil kesehatan yang disusun setiap tahunnya. Dalam hal ini derajat kesehatan masyarakat Sumut salah satunya terlihat dari peningkatan angka harapan hidup di Sumut. Sejak 2018 terus meningkat dari 68,61 tahun menjadi 68,5 pada tahun 2019. Selanjutnya meningkat lagi menjadi 69,10 tahun pada tahun 2020. Angka tersebut melebihi target yang telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Sumut untuk tahun 2020.

Diketahui, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut juga memiliki program kesehatan yang inovatif untuk menjangkau seluruh masyarakat Sumut, yaitu program Bakti Kesehatan Bermartabat. Program yang diluncurkan sejak tahun 2019 oleh Gubernur Edy Rahmayadi, kini dilengkapi dengan tiga unit bus yang memiliki berbagai peralatan medis, sehingga memungkinkan melakukan tindakan operasi medis di lapangan.

Rumah sakit bergerak ini, juga bertujuan untuk menjangkau masyarakat di daerah terpencil, yang sulit mengakses pelayanan kesehatan. Sejauh ini sudah

ratusan orang dari seluruh penjuru Sumut yang dilayani oleh rumah sakit bergerak tersebut.

Selain itu, mengenai ketersediaan sarana kesehatan di Sumut juga cukup memadai. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik menyebutkan jumlah rumah sakit yang ada di Sumut tahun 2020 mencapai 178 unit rumah sakit, 8 rumah sakit bersalin, 835 poliklinik, 628 Puskesmas, dan 1.874 Puskesmas Pembantu. Jumlah tenaga medis juga meningkat setiap tahun. Jumlah dokter umum di Sumut tahun 2020 terdapat sebanyak 5.560 orang, dokter gigi 1.029 orang. Sedangkan tenaga medis bidan tersedia sebanyak 20.924 orang dan perawat sebanyak 21.234 orang.

2.2.3. Program Prioritas Peningkatan Kesempatan Kerja dan Berusaha Melalui Penyediaan Lapangan Pekerjaan

Menurut undang-undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 1, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melaksanakan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 8 mengenai perencanaan tenaga kerja dan informasi ketenagakerjaan meliputi: Kesempatan kerja, Pelatihan kerja, Produktivitas tenaga kerja, Hubungan industrial, Kondisi lingkungan kerja, Pengupahan dan Kesejahteraan tenaga kerja. Masalah ketenagakerjaan terus menerus mendapat perhatian dari berbagai pihak, seperti pemerintah, lembaga pendidikan, masyarakat dan keluarga.

Pemerintah melihat masalah ketenagakerjaan sebagai salah satu bahkan sentral pembangunan nasional, karena ketenagakerjaan itu pada hakikatnya adalah tenaga pembangunan yang banyak sumbangannya terhadap keberhasilan pembangunan bangsa termasuk pembangunan di sektor ketenagaan itu sendiri. Dimana pembangunan ketenagakerjaan bertujuan untuk :

1. Memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimum,
2. Menciptakan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan pembangunan nasional.

3. Memberikan perlindungan bagi tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraannya, dan
4. Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya.

Dalam pembangunan ketenagakerjaan, pemerintah diharapkan dapat menyusun dan menetapkan perencanaan tenaga kerja. Perencanaan tenaga kerja dimaksudkan agar dapat dijadikan dasar dan acuan dalam penyusunan kebijakan. Strategi dan implementasi program pembangunan ketenagakerjaan yang berkesinambungan. Sebagian besar manusia di muka bumi Indonesia menyadari bahwa dalam pelaksanaan pembangunan nasional, tenaga kerja memiliki peran dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku (actor) dalam mencapai tujuan pembangunan.

Lapangan pekerjaan dapat dikatakan sebagai sebuah lahan yang dicari oleh masyarakat luas. Banyak orang yang berlomba-lomba untuk mencari pekerjaan saat ini. Sulitnya lapangan pekerjaan membuat masyarakat perlu mengembangkan potensi yang ada didalam dirinya agar mereka dapat memperoleh pekerjaan yang layak didalam persaingan yang ketat ini. Susahnya lapangan pekerjaan menjadi faktor yang harus diperhatikan pada masyarakat (Badan Pusat Statistik, 2010).

Banyaknya orang yang mencari pekerjaan saat ini tidak membuat lapangan pekerjaan yang tersedia dapat terpenuhi seluruhnya, seperti halnya pada bagian marketing. Salah satu permasalahan yang terjadi pada kebanyakan perusahaan saat ini adalah sistem kompensasi yang diberlakukan oleh perusahaan tersebut, baik itu dari segi gaji, komisi, bonus, tunjangan, dan lain sebagainya. Kebijakan yang dilakukan oleh perusahaan biasanya dilakukan untuk mengurangi biaya perusahaan dan untuk mencapai target yang telah ditentukan (Santoso, 2012).

2.2.4. Program Prioritas Peningkatan Daya Saing Melalui Sektor Agraris

Pertanian merupakan sektor ekonomi yang utama di Negara-Negara Berkembang. Peran atau kontribusi sektor pertanian dalam pembangunan ekonomi suatu negara menduduki posisi yang penting sekali. Hal ini antara lain disebabkan beberapa faktor (Mardikanto, 2007:3). Pertama, sektor pertanian merupakan sumber persediaan bahan makanan dan bahan mentah yang dibutuhkan oleh suatu

Negara. Kedua, tekanan-tekanan demografis yang besar di negara-negara berkembang yang disertai dengan meningkatnya pendapatan dari sebagian penduduk menyebabkan kebutuhan tersebut terus meningkat. Ketiga, sektor pertanian harus dapat menyediakan faktor-faktor yang dibutuhkan untuk ekspansi sektor-sektor lain terutama sektor industri. Faktor-faktor ini biasanya berwujud modal, tenaga kerja, dan bahan mentah. Keempat, sektor pertanian merupakan sektor basis dari hubungan-hubungan pasar yang penting berdampak pada proses pembangunan.

Sektor ini dapat pula menciptakan keterkaitan kedepan dan keterkaitan kebelakang yang bila disertai dengan kondisi-kondisi yang tepat dapat memberi sumbangan yang besar untuk pembangunan. Kelima, sektor ini merupakan sumber pemasukan yang diperlukan untuk pembangunan dan sumber pekerjaan dan pendapatan dari sebagian besar penduduk negara-negara berkembang yang hidup di pedesaan.

Pembangunan pertanian dihadapkan pada tantangan bagaimana pertumbuhan ekonomi yang dicapai agar mampu meningkatkan pendapatan petani. Orientasi pertumbuhan ekonomi harus mampu meningkatkan kualitas dan distribusi kesejahteraan yang semakin merata. Paradigma pembangunan pertanian harus mampu dilakukan secara berimbang dan menyeluruh atau disebut dengan pertanian untuk pembangunan (*Agriculture for Development*). Pengembangan struktur perekonomian yang berbasis keunggulan kompetitif menjadi perhatian khusus untuk mendukung terwujudnya pertanian Indonesia yang maju, mandiri dan modern (Kementrian Pertanian, 2021.)

Tujuan pembangunan pertanian tersebut akan dapat tercapai jika program pembangunan direncana, dilaksanakan dan dievaluasi secara komprehensif. Program pembangunan pertanian diartikan sebagai rangkaian dalam mengembangkan sistem agribisnis yang berdaya saing, berkelanjutan dan berbasis ekonomi lokal. Salah satu pendekatan yang dilakukan dalam pembangunan pertanian adalah pendekatan lokal dan wilayah dimana pembangunan dimulai dari karakteristik dan potensi dari wilayah masing masing. Perencanaan pembangunan pertanian salah satunya difokuskan pada pengembangan komoditas strategis dan

unggulan nasional sesuai dengan tiga kaidah pembangunan pertanian yakni membangun perbatasan, berbasis kawasan dan menjaga keberlanjutan. Pengembangan wilayah berbasis komoditas unggulan akan berkaitan dengan usaha untuk meningkatkan perekonomian dan keseimbangan antar wilayah, sehingga setiap daerah akan mampu melaksanakan.

Provinsi Sumatera Utara adalah salah satu provinsi di Indonesia yang menempatkan sektor pertanian menjadi sektor yang memberikan kontribusi utama dalam pembentukan PDRB dan penyerapan tenaga kerja. Sektor pertanian merupakan sektor andalan sebagai penyumbang PDRB dan juga sebagai sektor yang menyerap tenaga kerja terbanyak dibandingkan sektor lain.

Mengingat pentingnya sektor pertanian bagi ekonomi di Provinsi Sumatera Utara, maka sektor pertanian sudah seharusnya dijadikan sektor penggerak pembangunan di Sumatera Utara agar eksistensi sektor pertanian tetap kuat dalam perekonomian adalah dengan berfokus pada pengembangan komoditas unggulan daerah. Pengembangan wilayah yang didasarkan pada komoditas unggulan selanjutnya akan digunakan sebagai pijakan dalam memberi pertimbangan untuk menentukan strategi pengembangan wilayah.

2.2.5. Program Prioritas Peningkatan Daya Saing Melalui Sektor Pariwisata

Sektor pariwisata merupakan sektor penting dalam pembangunan perekonomian nasional maupun daerah. Seperti yang dituangkan dalam konsep Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025 (MP3EI), bahwa sektor pariwisata dikategorikan sebagai sektor prioritas bersama tujuh sektor lainnya, yaitu pertanian, pertambangan, energi, industri, kelautan, dan telematika serta pengembangan kawasan strategis.

Pengembangan sektor pariwisata di Indonesia diatur dalam UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Undang-undang ini memberikan batasan definisi pariwisata dan kepariwisataan sebagai berikut: "Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah".

Sebuah daerah dengan sektor pariwisatanya mampu dikatakan kompetitif jika dapat menarik wisatawan. Daya saing pariwisata secara langsung mempengaruhi kondisi permintaan pariwisata dalam hal jumlah wisatawan baik wisatawan mancanegara maupun wisatawan nusantara, dan secara tidak langsung mempengaruhi industri pendukung seperti jumlah hotel, jumlah restoran dan jumlah biro perjalanan wisata (Tsai, Song, dan Wong, 2009).

Sektor pariwisata merupakan salah satu penggerak ekonomi lokal seperti kerajinan dan industri rumah tangga sebagai industri pendukung (Darmawan, 2015). Selain itu, kontribusi sektor pariwisata tidak hanya berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, tetapi juga berkontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja. Bentuk kontribusi sektor pariwisata dapat berupa penyediaan lapangan pekerjaan secara langsung dan tidak langsung (Firdausy, 2015).

Pemerintah daerah tentu mengetahui potensi yang dimiliki oleh daerahnya, termasuk potensi pariwisata. Sejalan dengan UU Otonomi Daerah Nomor 32 Tahun 2004, negara memberikan kesempatan kepada daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

Provinsi Sumatera Utara merupakan sebuah provinsi yang terletak di pulau Sumatera, , daerah yang memiliki tiga puluh tiga kabupaten dan kota. Daerah yang memiliki banyak objek wisata andalan seperti wisata sejarah, wisata alam, wisata kuliner, dan wisata buatan.

Di dalam Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah (RIPPARDA) Provinsi Sumatera Utara 2017-2025, tertuang visi pembangunan Kepariwisata Daerah yaitu: “Terwujudnya Sumatera Utara Menjadi Daerah Tujuan wisata berbudaya dan berdaya saing”. Sebagai salah satu Destinasi Wisata Tujuan (DWT), sektor pariwisata provinsi sumatera utara menjadi salah satu andalan pemerintah dalam meningkatkan kontribusi terhadap Pendapatan Daerah Regional Bruto (PDRB) provinsi sumatera utara.

2.2.6. Program Prioritas Peningkatan Kualitas Reformasi Birokrasi

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi tahun 2022-2023 dalam tata kelola

reformasi birokrasi nasional telah masuk kepada periode ketiga atau periode terakhir dari Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional. Pada tahap akhir ini Reformasi Birokrasi diharapkan menghasilkan karakter birokrasi yang berkelas dunia (*world class bureaucracy*) yang dicirikan dengan beberapa hal, yaitu semakin meningkatnya kualitas pelayan publik dan tata kelola yang semakin efektif dan efisien. Oleh karena itu diperlukan strategi dan intensitas pelaksanaan yang lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, terutama berkaitan dengan penguatan ekosistem reformasi birokrasi.

Secara ringkas Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah memuat serangkaian aktifitas disertai tata kelola dan pendokumentasiannya pada setiap area perubahan reformasi birokrasi, yang diarahkan untuk meningkatkan kinerja Perangkat Daerah dalam mencapai sasaran Perangkat Daerah dan sasaran program kegiatan Perangkat Daerah antara lain :

1. Kinerja yang ingin dicapai merupakan dasar pelaksanaan reformasi birokrasi instansi. Oleh karena itu semua aktifitas penyelenggaraan reformasi birokrasi pada 8 area perubahan harus fokus pada optimalnya capaian kinerja instansi. Berkaitan dengan hal tersebut pendefinisian kinerja mulai dari sasaran strategis Perangkat Daerah, sasaran program, output kegiatan harus jelas dan terukur;
2. Kepemimpinan, berkaitan dengan komitmen dan peran para pimpinan sebagai penggerak reformasi birokrasi instansi, kolaborasi pimpinan dalam membentuk tim Reformasi Birokrasi Instansi fokus memperbaiki 2 hal yakni :
 - 2 a. meningkatkan intensitas aktifitas-aktifitas komunikasi, informasi, edukasi dan advokasi reformasi birokrasi sehingga komitmen berubah meningkat dan partisipasi seluruh SDM aparatur pada Perangkat Daerah secara optimal, b. memperbaiki mekanisme kerja tim agar lebih efektif dan efisien;
3. Manajemen informasi, berkaitan dengan pendokumentasian dan publikasi aktifitas instansi sebagai wujud akuntabilitas instansi. perbaikan pada subsistem ini diarahkan untuk membiasakan Perangkat Daerah mendokumentasikan dan mempublikasikan kedalam dan keluar secara keseluruhan capaian perubahan yang sedang dan telah dilaksanakan. Publikasi

kedalam juga diarahkan untuk memperkuat upaya komunikasi, informasi, edukasi dan advokasi sehingga partisipasi meningkat;

4. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi diperkuat sebagai upaya mendapatkan informasi capaian kemajuan penyelenggaraan reformasi birokrasi sekaligus untuk mendapatkan masukan penyempurnaan atas target, strategi dan upaya-upaya yang sudah ditempuh. Oleh karena itu intensitas pertemuan-pertemuan berkala monev reformasi birokrasi ditingkatkan, baik melalui tatap muka maupun memanfaatkan teknologi informasi komunikasi.

Di bidang reformasi birokrasi, Pemprov Sumut telah mendapat 8 kali opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK. Serta mendorong pemerintah kabupaten/kota agar mendapat opini WTP. Sehingga 26 kabupaten/kota memperoleh opini WTP.

2.2.7. Prioritas Peningkatan Sosial Kemasyarakatan dan Olahraga

Secara etimologis, pemberdayaan (empowering) berasal dari kata dasar daya” yang berarti kekuatan atau kemampuan. Bertolak dari pengertian tersebut, maka pemberdayaan dapat diartikan sebagai suatu proses menuju berdaya, dan atau proses pemberiandaya/kekuatan/kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya (Ambar Teguh, 2004:77). Jadi pemberdayaan adalah memberika kekuatan kepada orang yang lemah. Pemberdayaan sangat erat kaitannya dengan pembangunan, oleh karena itu tujuan pemberdayaan yaitu untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri, misalnya kemandirian dalam berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang ingin dilakukan.

Pemberdayaan merupakan pembangunan berbasis masyarakat, pelaku utamanya adalah masyarakat dan tujuan utamanya pun masyarakat yaitu agar terciptanya kemandirian yang mampu berpikir, dan menyelesaikan masalah dengan bijak. Jadi pada dasarnya tujuan pemberdayaan yaitu untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengemukakan pendapat yang diinginkannya tanpa ada rasa canggung dan merasa deskriminasi. Menurut Anwar (2007:80) proses pemberdayaan pada dasarnya memiliki empat karakteristik

yaitu; Organisasi social masyarakat, Manajemen dan kolaborasi pekerja, Pendekatan, partisipasi dalam pendidikan orang dewasa, iset dan pembangunan desa Pendidikan terutama ditujukan untuk melawan kejanggalan dan ketidakadilan yang dialami individu atau kelompok tertentu.

Menurut Agus (2008: 11-12) prinsip-prinsip pemberdayaan sebagai berikut:

1. Pembangunan yang dilakukan harus bersifat lokal.
2. Lebih mengutamakan aksi sosial
3. Menggunakan pendekatan partisipasi, para anggota kelompok sebagai subjek bukan objek
4. Usaha kesejahteraan sosial untuk keadilan realisasi pemberdayaan masyarakat kerap kali dilibatkan organisasi-organisasi kemasyarakatan yang paling dekat dengan masyarakat seperti PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga), PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat), Majelis Taklim, hingga Karang Taruna yang menjadi bagian dari masyarakat dalam proses pembangunan.

2.2.8. Prioritas Pembangunan Infrastruktur Yang Baik dan Berwawasan Lingkungan

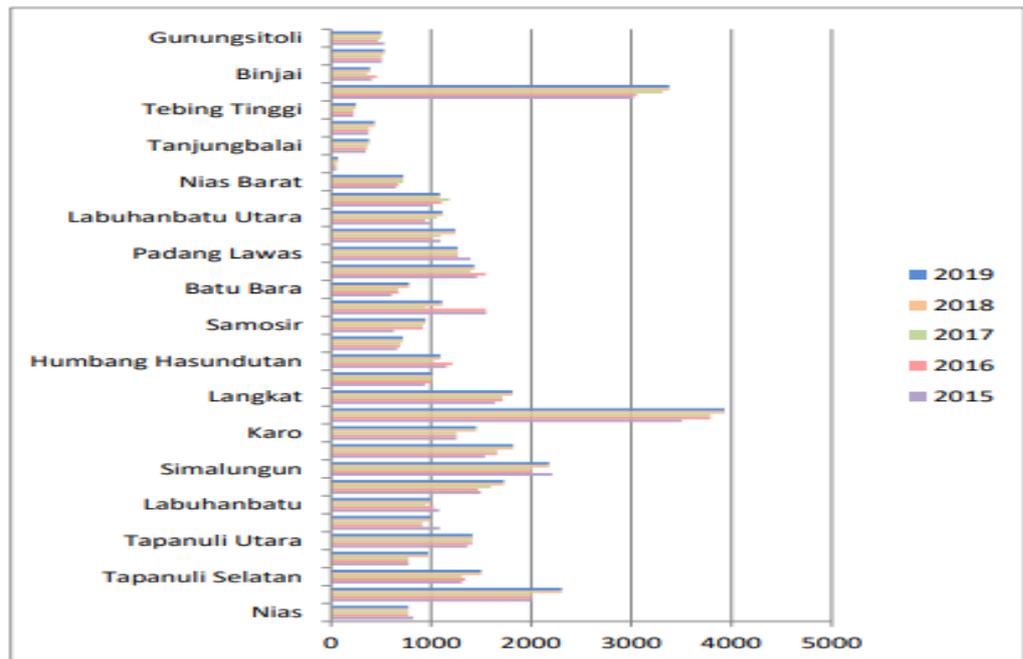
Sustainable Development Goals (SDGs) yang dikenal dengan pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan merupakan merupakan suatu kerangka aksi yang diusung oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai langkah penting dalam mencapai pembangunan global. 17 SDGs disepakati pada tahun 2015 oleh para pemimpin dunia dalam naungan organisasi PBB, termasuk Indonesia, guna mencapai tiga tujuan utama yaitu mengakhiri kemiskinan, memerangi kesenjangan, dan menghentikan perubahan iklim global.

SDG berisi 17 GOAL dan 169 target yang diharapkan dapat dicapai pada tahun 2030. Upaya pencapaian ketujuh belas goal ini tidak lepas dari partisipasi berbagai pihak, meliputi pemerintah, pihak swasta, organisasi masyarakat sipil (Civil Society), akademisi, dan masyarakat. Walaupun pemerintah adalah pemegang tongkat kebijakan dalam pelaksanaan SDG, masyarakat sebagai

komunitas terbesar yang menjadi penggerak utama dalam menentukan laju pencapaian target SDG.

Salah satu fokus utama pada masa pemerintahan saat ini adalah pembangunan infrastruktur. Hal itu dilakukan pemerintah mengingat masih minimnya infrastruktur yang tersedia di daerah-daerah Indonesia. Program tersebut masuk ke dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dengan tujuan perwujudan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat. Terlihat bahwa dari 7 (tujuh) agenda RPJMN IV tahun 2020-2024 terdapat 2 (dua) tugas terkait pengembangan daerah dengan tujuan menurunkan ketimpangan dan memperkuat infrastruktur untuk mencapai pengembangan ekonomi dan layanan dasar (Bappenas, 2019). Hal itu juga sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara tahun 2019-2023 yang menetapkan pembangunan Provinsi Sumatera Utara diprioritaskan kepada salah satunya yaitu peningkatan infrastruktur yang baik dan berwawasan lingkungan (Bappeda Sumatera Utara, 2019). Dengan demikian, pembangunan infrastruktur pada saat ini tidak hanya dilakukan terpusat di pulau Jawa saja, melainkan telah dilakukan menyebar ke segala penjuru daerah di Indonesia, termasuk Provinsi Sumatera Utara.

Peningkatan infrastruktur dapat memberikan efisiensi, memperlancar arus barang dan jasa, menurunkan biaya, dan kemudahan akses bagi masyarakat untuk melakukan kegiatan (Iqbal dkk., 2019). Ketersediaan infrastruktur yang memadai juga dapat mendorong produktivitas suatu daerah. Contohnya infrastruktur seperti panjang 5 jalan raya yang secara perlahan mengalami peningkatan di beberapa kabupaten/kota Provinsi Sumatera Utara. Hal ini dapat dilihat pada gambar 2.1.



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara 2021

Pada gambar 2.1. terlihat bahwasanya panjang jalan pada 5 tahun kebelakang (2015-2019) di wilayah Provinsi Sumatera Utara mengalami peningkatan, walaupun terdapat beberapa wilayah yang mengalami fluktuasi, yaitu panjang jalan mengalami tren naik turun (penambahan dan pengurangan jalan). Terjadinya pengurangan jumlah 0 1000 2000 3000 4000 5000 Nias Tapanuli Selatan Tapanuli Utara Labuhanbatu Simalungun Karo Langkat Humbang Hasundutan Samosir Batu Bara Padang Lawas Labuhanbatu Utara Nias Barat Tanjungbalai Tebing Tinggi Binjai Gunungsitoli 2019 2018 2017 2016 2015 6 panjang jalan diakibatkan adanya perpindahan kewenangan oleh pemerintah pusat. Pada tahun 2019 Kabupaten Deli Serdang menjadi daerah yang memiliki panjang jalan tertinggi yaitu sebesar 3.931,41 km dan selanjutnya diikuti oleh Kota Medan sebesar 3.379,62 km. Hal itu sejalan jika dilihat dari peningkatan panjang jalan dari tahun 2015 dibandingkan dengan tahun 2019. Kabupaten Deli Serdang menjadi daerah dengan peningkatan panjang jalan tertinggi yaitu sebesar 425,61 km diantara kabupaten/kota di Sumatera Utara. Selanjutnya diikuti oleh Kota Medan sebesar 357,8 km.

Peningkatan infrastruktur jalan juga terjadi pada jalan tol, dengan

beroperasinya dua ruas tol baru di Sumatera Utara menyebabkan peningkatan panjang tol menjadi 113 km dari semula hanya 33 km. Penambahan panjang jalan tol juga sampai saat ini sedang menjalani proses pembangunan. Terjadinya peningkatan infrastruktur jalan dapat memberikan dampak pada kemudahan mobilitas sosial dan pendistribusian barang ke berbagai daerah. Dampak yang ditimbulkan tidak sampai disitu saja, karena dengan tersedianya jalan yang memadai menyebabkan tingkat harga menjadi lebih rendah sehingga dapat bersaing di pasaran dan dapat menjangkau masyarakat di daerah pedalaman (Sumadiasa dkk., 2016).

Selain jalan, daya listrik yang terjual kepada konsumen di Sumatera Utara juga mengalami peningkatan. Menurut Badan Pusat Statistika pada tahun 2015 listrik yang disalurkan sebesar 8.703.660.000 kWh dan mengalami peningkatan secara signifikan pada tahun 2019 sebesar 10.943.860.000 kWh. Jika dilihat dari kabupaten/kota, Kota Medan menjadi daerah dengan jumlah listrik yang disalurkan paling banyak yaitu sebesar 2.063.952.000 kWh diikuti dengan Kota Binjai sebesar 1.392.093.428 kWh dan daerah terendah adalah Kabupaten Samosir sebesar 3.304.685 kWh. Listrik menjadi salah satu infrastruktur yang sangat terpenting untuk melakukan berbagai kegiatan ekonomi. Tersedianya listrik yang memadai dapat mendorong akses pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Pendistribusian listrik yang merata pada daerah perdesaan terutama daerah industri dan padat karya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Iqbal dkk. (2017) bahwasanya terdapat hubungan PDB per kapita masyarakat dengan tingkat konsumsi listrik. Dimana 7 tingkat konsumsi listrik masyarakat dipengaruhi oleh seberapa besar pendapatan per kapita. Apabila pendapatan per kapita semakin tinggi maka terdapat kemungkinan konsumsi listrik masyarakat juga meningkat. Hal ini mengindikasikan bahwa ketersediaan listrik dapat meningkatkan produktivitas daerah sehingga dapat meningkatkan distribusi pendapatan yang lebih merata.

Selanjutnya infrastruktur volume air bersih, dimana setiap tahunnya mengalami fluktuasi. Menurut Badan Pusat Statistika Provinsi Sumatera Utara

pada tahun 2019 jumlah air yang disalurkan ke konsumen mencapai 247.017.140 m³. Jika dibandingkan pada tahun sebelumnya volume air bersih mengalami penurunan sebesar 63.041.611 m³. Jumlah air terbanyak yang disalurkan ke konsumen pada tahun 2019 berada di Kota Medan yaitu sebesar 144.929 m³ atau sebesar 25,52% dari total volume air yang disalurkan ke konsumen di Sumatera Utara.

Selain infrastruktur jalan, air, dan listrik yang umum diperbincangkan, infrastruktur ekonomi berupa irigasi juga dapat mempengaruhi ketimpangan pembangunan ekonomi. Tersedianya irigasi yang baik dapat memberikan dampak terhadap peningkatan produksi pertanian dan kesejahteraan petani. Berdasarkan data dari BPS Sumut pada tahun 2015-2019 bahwa telah terjadi penurunan lahan sawah dengan pengairan irigasi. Pada tahun 2019 Kabupaten Serdang Bedagai menjadi daerah yang memiliki lahan sawah dengan pengairan irigasi terbesar yaitu sebesar 38.151 hektar diikuti dengan Kabupaten Simalungun yang mencapai 32.967 hektar dan daerah yang sama sekali tidak memiliki luas sawah berpengairan irigasi berada di Kota Sibolga.

Pembangunan infrastruktur di Provinsi Sumatera Utara memang telah dilaksanakan dalam beberapa waktu, tetapi tidak segenyar pada masa pemerintahan saat ini. Pemerintahan saat ini melakukan pembangunan infrastruktur sebagai suatu program prioritas guna mendorong laju pertumbuhan ekonomi nasional (Bappenas, 2019). Akibatnya tentu memberikan masalah baru berupa ketidakmerataan penyebaran infrastruktur yang dapat menimbulkan masalah ketimpangan ekonomi. Atas permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait pengaruh peningkatan infrastruktur terhadap ketimpangan ekonomi di Sumut.

BAB III METODE KAJIAN

3.1. Lokasi dan Jadwal Kegiatan

Lokasi kegiatan dilaksanakan di Provinsi Sumatera Utara dan luar Sumatera Utara sebagai pembanding. Kegiatan dilaksanakan dalam waktu II (Dua) bulan sejak tanggal 21 Juli s.d 21 September 2023.

No	Uraian Kegiatan	Juli	Agustus				September	
		4	1	2	3	4	3	4
1.	Analisis capaian kinerja kegiatan strategis di provinsi sumatera utara							

3.2. Jenis dan Sumber data

Jenis data yang digunakan dalam kajian ini adalah data sekunder yang bersumber dari dokumen RPJMD, realisasi APBD setiap OPD terkait

3.3. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan tahapan analisis sebagai berikut:

- 1) Analisis data sekunder dengan cara mengumpulkan seluruh data yang diperlukan untuk menggambarkan capaian kinerja
- 2) Tabulasi perbandingan anggaran dan realisasi anggaran berdasarkan persentase untuk melihat kemampuan penyeraban anggaran yang dijalankan oleh OPD
- 3) Uraian deskriptif kualitatif berdasarkan justifikasi perbandingan realisasi anggaran dan ketercapaian program dan kegiatan OPD
- 4) Penyusunan matrik hasil FGD yang dilaksanakan berdasarkan masukan dan tanggapan seluruh stakholder.

BAB IV
DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA

4.1. Deskripsi Data (Target)

4.1.1. Capaian Program Prioritas Hingga Juli 2023

4.1.1.1. Program Prioritas Peningkatan Daya Saing Melalui Sektor Pariwisata

1. *Pengembangan kawasan pariwisata, meliputi ekowisata tangkahan, bahorok/ bukit lawang - langkat; agrowisata ulu pungkut - madina; wisata alam dan budaya - kepulauan nias; wisata religi dan sejarah baru – tapanuli tengah; wisata religi dan sejarah candi bahal – padang lawas utara.*

No	Nama SKPD	Nama Keiatan	Waktu	Pagu/ Nilai Kontrak
1.	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Pembayaran Uang Muka 30% Atas Kegiatan Penataan Sarana Dan Prasarana Serta Fasilitas Umum Pariwisata Di Destinasi Pariwisata Sumut Bukit Lawang, Bahorok, Kabupaten Langkat	135 Hari Kalender	4.575.310.000,00 858.325.559,37
2.	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Pembayaran Uang Muka 30% Atas Pekerjaan Penataan Sarana Dan Prasarana Serta Fasilitas Umum Pariwisata Di Destinasi Pariwisata Sumut Tangkahan, Batang Serangan, Kabupaten Langkat	135 Hari Kalender	4.575.310.000,00 865.955.208,07

2. *Dukungan penataan cagar budaya kesultanan langkat, situs benteng putri hijau, bawomataluo dan lapangan merdeka medan.*

No	Nama SKPD	Nama Keiatan	Waktu	Pagu/ Nilai Kontrak
1.	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Uang Muka (30%) Revitalisasi Dan Penyediaan Sarana PrasaranaSitus Mesjid Azizi Tanjung Pura, Kabupaten Langkat	3 Bulan	1.599.967.027,25 1.565.906.797,22
2.	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Pembayaran uang muka (30%) atas pekerjaan belanja modal Bangunan gedung kantor - penataan situs benteng putri hijauT.A.2023	120 Hari Kalender	2.299.440.000,00 2.179.527.906,76
3	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Pembayaran Uang Muka (30%) Atas Penataan Komplek Situs BagasGodang Ulu Pungkut, Kab.Madina	120 Hari Kalender	1.491.645.000,00 1.439.077.151,35
4	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Belanja modal tanaman penataan situs benteng putri hijau T.A. 2023	1 Bulan	197.954.000,00 195.000.000,00

3. *Dukungan pengembangan destinasi pariwisata super prioritas danau toba melalui pemenuhan 6 (enam) rekomendasi UNESCO dalam rangka mempertahankan status UNESCO Global Geopark Kaldera Toba.*

No	Nama SKPD	Nama Keiatan	Waktu	Pagu/ Nilai Kontrak
1	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Belanja Pendukung Kegiatan Sosialisasi Edukasi InteraktifTerhadap Siswa Sekolah Di Kawasan Toba Caldera Uggp TA.2023	14 Hari Kalender	96.688.781,00 96.100.470,00
2	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Belanja pendukung kegiatan sosialisasi mitigasi bencana alam danperubahan iklim di KSPN danau toba T.A.2023	14 Hari Kalender	82.562.677,00 82.478.106,00

3	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Belanja pendukung kegiatan pelatihan pemandu wisata di geosite toba caldera UGGP.	14 Hari Kalender	195.695.775,00 192.068.739,00
---	--	---	------------------	----------------------------------

4. *Digitalisasi Promosi Pariwisata*

No	Nama SKPD	Nama Keiatan	Waktu	Pagu/ Nilai Kontrak
1	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Sosialisasi Digitalisasi Pemasaran Pariwisata	15 Hari Kalender	116.370.450,00 116.006.433,00
2	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Pelaksanaan Sosialisasi Digitalisasi Pemasaran Di KabupatenSimalungun (Belanja Eo)	15 Hari Kalender	116.370.450,00 115.866.795,00
3	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Pengadaan bahan kegiatan digitalisasi promosi pariwisata (brosurdan papan nama).	15 Hari Kalender	84.000.000,00 84.000.000,00
4	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Partisipasi Pelaksanaan Event Pariwisata Dalam Dan Luar Negeri -Sewa Stand Pada Pameran Inacraft	10 Hari Kalender	60.000.000,00 60.000.000,00
5	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Pembiuatan Pengembangan Aplikasi Digitalisasi Promosi Pariwisata.	1 Bulan	150.000.000,00 149.922.150,00
6	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Belanja Modal Peralatan Jaringan - Pembuatan Website Digitalisasi Promosi Pariwisata	1 Bulan	194.670.000,00 194.483.100,00
7	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Pelaksanaan Sosialisasi Digitalisasi Pemasaran Di KabupatenTapanuli Selatan	15 Hari Kalender	116.370.450,00 114.074.811,00

8	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Pelaksanaan Sosialisasi Digitalisasi Pemasaran Di Kabupaten Nias Utara	20 Hari Kalender	118.343.572,00 118.343.572,00
9	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Pengadaan Alat Digitalisasi Promosi Pariwisata (Digital Signage)	1 Bulan	129.780.000,00 129.759.000,00
10	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Pelaksanaan Sosialisasi Digitalisasi Pemasaran Di Kabupaten Batubara (Belanja EO)	1 Bulan	118.534.014,00 117.970.578,00
11	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Sewa Tempat Pemasangan Iklan Pariwisata (Videotron)	35 Hari Kalender	95.000.000,00 92.685.000,00
12	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Belanja Event Organizer Rakor Pemasaran Dan Promosi Pariwisata	15 Hari Kalender	95.569.335,00 95.002.125,00
13	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Penyediaan Akomodasi Dan Makan Minum Rakor Pemasaran Dan Promosi Pariwisata	15 Hari Kalender	155.203.530,00 154.678.500,00

4.1.1.2. Program Prioritas Peningkatan Kualitas Reformasi Birokrasi

Belum Ada data Realisasi

4.1.1.3. Program Prioritas Peningkatan Sosial Kemasyarakatan dan Olah Raga

No	Nama SKPD	Nama Keiatan	Waktu	Pagu/ Nilai Kontrak
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kosultansi Perencanaan Pembangunan Akses Jalan Menuju Proyek Stadion untuk Kebutuhan PON XXI 2024	30 (tiga puluh) hari kalender	100.000.000,00 99.567.000,00
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Akses Jalan Menuju Proyek Stadion untuk kebutuhan PON XXI 2024 1 Paket Jalan Lingkungan Beton 2,5 M	90 (sembilan puluh) hari kalender	5.186.404.440,00 5.099.224.274,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Supervisi Pembangunan Akses Jalan Menuju Proyek Stadion untuk kebutuhan PON XXI 2024	90 (sembilan puluh) hari kalender	200.000.000,00 100.000.000,00
4	Inspektorat	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan - Sosialisasi Evaluasi SAKIP Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	1 (Satu) Hari Kalender	182.700.000,00 63.250.000,00

4.1.1.4. Program Prioritas Pembangunan Infrastruktur Yang Baik Dan Berwawasan Lingkungan

1.1. Penanganan jalan strategis provinsi dalam kondisi baik yang meliputi jalan strategis kawasan wisata, kawasan pusat produktivitas, perkotaan dan kawasan daerah tertinggal sepanjang 218,22 (dua ratus delapan belas koma dua puluh dua) kilometer dan pencapaian tingkat kemantapan jalan provinsi Sumatera Utara sampai dengan 85 (delapan puluh lima) persen

No	Nama SKPD	Nama Keiatan	Waktu	Pagu/ Nilai Kontrak
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Jalan dan Jembatan Provinsi untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi Sumatera Utara	540 Hari	1.500.000.000.000,00 2.648.281.761.981,99
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PHJD Ruas Jalan Sp. Situnggaling - Tongging - Bts. Dairi di Kab. Karo	238 HARI	30.329.377.415,00 29.675.000.000,00

3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PHJD Ruas Jalan Sp. Lae Pandom - Sialahi - Bts. Karo di Kab. Dairi	233 Hari Kalender	15.775.000.000,00 15.652.933.700,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PHJD Ruas Jalan Bakkara-Janji Raja di Kab. Humbang Hasundutan	240 (dua ratus empat puluh) hari kalender	15.251.550.000,00 14.867.614.920,00
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penanganan Long Segment (Pemeliharaan Rutin, Pemeliharaan Berkala, Peningkatan/Rekonstruksi) pada Ruas Balige - Tara Bunga- Meat (Batas Taput) di Kab. Toba (DAK)	240 Hari Kelender	26.228.981.000,00 25.573.174.460,00
6	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penanganan Long Segment (Pemeliharaan Rutin, Pemeliharaan Berkala, Peningkatan/Rekonstruksi) pada Ruas Siborongborong-Sipahutar di Kab. Tapanuli Utara (DAK)	240 Hari Kelender	10.832.311.000,00 10.484.087.840,00
7	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Saluran Drainase pada ruas jalan Aek Nabara Tonga-Sibuhuan di Kab. Padang Lawas	45 Hari Kelender	198.500.000,00 198.250.000,00
8	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Tembok Penahan pada Ruas Jalan Aek Nabara Tonga-Sibuhuan di Kab. Padang Lawas	45 Hari Kelender	200.000.000,00 199.800.000,00
9	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Tembok Penahan pada Ruas Jalan Binanga-Aek Nabara Tonga di Kab. Padang Lawas	45 Hari Kelender	200.000.000,00 199.850.000,00
10	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Tembok Penahan pada Ruas Jalan Paringgonan-Sibuhuan di Kab. Padang Lawas	45 Hari Kelender	200.000.000,00 199.875.000,00
11	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Tembok Penahan pada Ruas Jalan Sihaporas-Paringgonan di Kab. Padang Lawas	45 Hari Kelender	200.000.000,00 199.850.000,00

1.2. Optimalisasi jaringan irigasi sebesar lebih kurang 65.000 (enam puluh lima ribu) hektar

No	Nama SKPD	Nama Keiatan	Waktu	Pagu/ Nilai Kontrak
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Konsultan Supervisi Peningkatan Jaringan Irigasi pada DI Mombang Boru (Pendukung DAK) Konsultan Supervisi	150 hr kalender	100.000.000,00 94.258.425,00
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Konsultan Supervisi Peningkatan Jaringan Irigasi pada DI Panombean/Panei Tongah/Bah Kata (Pendukung DAK) Konsultan Supervisi	150 hr kalender	100.000.000,00 94.258.425,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Konsultan Supervisi Peningkatan Jaringan Irigasi pada DI Simodong (Pendukung DAK) Konsultan Supervisi	150 hr kalender	100.000.000,00 94.258.425,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan D.I. Medan Krio Kec. Sunggal, Kab. Deli Serdang - Peningkatan Saluran Sekunder Sepanjang 400 m	120 (seratus dua puluh) hari kalender	998.514.720,00 965.260.978,00
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan D.I. Namo Rambe, Kec. Namo Rambe, Kab. Deli Serdang - Peningkatan Saluran Sekunder Sepj. 120 m	120 (seratus dua puluh) hari kalender	998.514.720,00 988.540.070,00
6	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa D.I.R. Percut, Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang - Peninggian Tanggul Pada Paluh 80 Sepanjang 400m	120 (seratus dua puluh) hari kalender	990.123.840,00 975.615.000,00

7	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa D.I.R. Sisir Gunting, Kec. Hamparan Perak, Kab. Deli Serdang - Peninggian Saluran Paluh Babi, Paluh Kurau Sepj. 3500m; Normalisasi Saluran Pembangunan Sepj. 4000m	120 (seratus dua puluh) hari kalender	990.123.840,00 972.771.960,00
8	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan D.I. Bah Tonang Kec. Sipispis, Kab. Serdang Bedagai, Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan pada Daerah Irigasi Bah Tonang, Kec. Sipispis, Kab. Serdang Bedagai, Rehab. Saluran Sekunder Sepj. 410m	120 Hari Kalender	998.514.720,00 929.511.002,73
9	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan D.I. Pekan Dolok, Kec. Dolok Masihul, Kab. Sergei, Peningkatan Jaringan Irigasi D.I. Pekan Dolok; Pembuatan Pasangan Saluran Primer 800m; Pembuatan Pasangan Saluran Sekunder 600m; dan Perbaikan Pintu Banguna	170 Hari Kalender	6.171.492.240,00 592.364.619,45
10	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan D.I. Panombean/P. Tongah/Bah Kata, Kec. Panombean Panei, Kab. Simalungun (DAK)	150 hari kalender	3.526.791.750,00 3.329.402.245,00
11	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan pada Daerah Irigasi Parit Lompaten 1.242 Ha (Saluran Sekunder Sukababo) [-] Konsultan Pengawasan (DAU) -Daerah Irigasi Parit	180 (seratus delapan puluh hari)	70.000.000,00 69.700.000,00

		Lompaten 1.242 Ha Kecamatan Juhar Kabupaten Karo (3,059419 - 98,324123)		
12	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan D.I. Simodong, Kec. Sei Suka, Kab. Batu Bara[-] Pembuatan Pasangan Saluran Sekunder Sepj. 3.500 m; Perbaikan Bangunan Bagi 1 Buah; Perbaikan Pintu Bangunan Bagi 17 Bh (DAK)	150 (Hari Kalender)	7.999.978.000,00 7.816.736.000,00
13	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Normalisasi Saluran D.I Cinta Maju/ Damai Normalisasi Saluran D.I Cinta Maju/Damai Sepj. 2.000 M	45 (Hari Kalender)	199.154.633,00 198.655.000,00
14	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Normalisasi Saluran D.I Serbangan [-] Normalisasi Saluran D.I Serbangan Sepj. 2.000M	45 (Hari Kalender)	199.154.633,00 198.339.000,00
15	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Normalisasi Saluran D.I Tanjung Muda, Normalisasi Saluran D.I Tanjung Muda Sepj. 2.000 M	45 (Hari Kalender)	141.709.585,00 141.052.000,00
16	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi pada D.I PANCA ARG A Kec. Rawang Panca Arga Kab. Asahan; Normalisasi Saluran Pembuang	45 (Hari Kalender)	194.728.974,00 194.692.000,00
17	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi pada D.I SERBANGAN Kec. Rawang Panca Arga Kab. Asahan, Normalisasi Saluran Pembuang	45 (Hari Kalender)	194.728.974,00 194.688.000,00
18	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi pada D.I SIJAMBI Kec. Simpang Empat Kab.Asahan; Normalisasi Saluran Pembuang	45 (Hari Kalender)	194.728.974,00 194.691.000,00

19	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi pada D.I SUKA MAKMUR Kec. Pulo Bandring Kab.Asahan; Normalisasi Saluran Sekunder	45 (Hari Kalender)	194.728.974,00 193.996.000,00
20	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pemeliharaan Sayap Bendung D.I Purwodadi (DAU)	45 (Hari Kalender)	193.227.838,00 192.494.000,00
21	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pemeliharaan Sayap Bendung D.I Tanjung Muda (DAU)	45 (Hari Kalender)	193.227.838,00 191.854.000,00
22	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pemeliharaan Berkala pada DIR. Cinta Makmur Desa Selat Besar, Kec. Bilah Hilir Kab. Labuhanbatu - Normalisasi Saluran Pembuang Saluran Selat Tengah 2000 m	04 - Mei - 2023 s/d09-juni-2023	199.154.633,00 198.585.192,59
23	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pemeliharaan Berkala pada DIR. Cinta Makmur Desa Tanjung Serang Elang, Kec. Panai Hulu Kab. Labuhanbatu - Normalisasi Saluran Pembuang Saluran Abadi 2000 m	02 - Mei - 2023 s/d 07-Juni-2023	199.154.633,00 198.572.128,93
24	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pemeliharaan Berkala pada DIR. Sei Rakyat/Sei Serdang Desa Bagan Bilah, Kec. Panai Tengah Kab. Labuhanbatu - Normalisasi Saluran Pembuang Saluran Sei Cina II sepj. 2000 m	03 - Mei - 2023 /d 08-Juni-2023	199.154.633,00 198.419.318,85
25	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pemeliharaan Berkala pada DIR. Sei Rakyat/Sei Serdang Desa Sei Rakyat, Kec. Panai Tengah Kab. Labuhanbatu - Normalisasi Saluran Pembuang Saluran Sei Cina I sepj 2000 m	01 - Mei - 2023 s/d 06-Juni-2023	199.154.633,00 198.434.212,70

26	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi pada DI. Hutapaung/Parmiahon Kec.Pollung Kab.Humbang Hasundutan - Perbaikan Saluran Sepj. 110 m	26 (dua puluh enam) hari kalender	199.314.192,00 198.875.800,00
27	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi pada DI. Lobu Tua Kec. Lintong Nihuta Kab.Humbang Hasundutan - Perbaikan Saluran Sepj. 77 m - Perbaikan bangunan sadap 1 bh - Normalisasi Saluran sepj. 1000 m	26 (dua puluh enam) hari kalender	199.314.192,00 198.328.300,00
28	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan D.I. Mombang Boru, Kec. Sibabangun, Kab. Tapteng Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan D.I. Mombang Boru, Kec. Sibabangun, Kab. Tapteng (DAK) '- Saluran Primer Sepj. 150 m' '- Saluran Sekunder Sepj. 1.170 m' '	"150 Hari Kalender 11 Juli s/d 07 Desember 2023"	3.500.000.000,00 3.291.360.960,49

1.3. Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Mebidang

No	Nama SKPD	Nama Keiatan	Waktu	Pagu/ Nilai Kontrak
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Konsultan Manajemen Konstruksi (MK), Supervisi dan Pengawasan (DAK)	240 (dua ratus empat puluh) hari kalender	2.538.080.000,00 2.432.481.750,00
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	[#] Pembangunan Transmisi Air Curah Untuk SPAM Regional Mebidang; Pengembangan Jaringan Distribusi Utama (JDU) Helvetia (Kec. Helvetia, Sunggal)	165 (seratus enam puluh lima) hari kalender	51.478.202.441,00 50.529.923.787,00

		Jaringan Perpipaan Sepanjang 6.906 m (375 l/det) (DAK)		
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	[#] Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Pengembangan Infrastruktur SPAM Kawasan Permukiman di Kec. Tanah Jawa Kab. Simalungun; Terbangunnya 1 (satu) sistem jaringan air minum sep. 3000m.	20 hari kalender	80.000.000,00 79.809.000,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pengembangan Infrastruktur SPAM Kawasan Permukiman di Kec. Tanah Jawa Kab. Simalungun; Terbangunnya 1 (satu) sistem jaringan air minum sep. 3000m. konsultan perencanaan teknis (DED, Amdal, SID	14 hari kalender	50.000.000,00 49.810.140,00
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan SPAM Kawasan MBR di Kec. Hutaimbaru Kota Padang Sidempuan	120 hari	1.243.404.000,00 1.191.955.000,00

4.1.2. Capaian Hingga September 2023

4.1.2.1. Program Prioritas Pembangunan Peningkatan dan Pemenuhan Akses Pendidikan

Pagu Anggaran : Rp 870,990,480

Nama OPD : Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provsu

NO	Kegiatan Mendukung Kegiatan Strategis Daerah (KSD)	Pagu Anggaran/ Kontrak	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik	Kendala & Hambatan
1	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor Berupa Penyediaan Pojok Baca di Kab, NiasUtara Pembangunan Gedung Negara Tidak Bertingkat Kelas Sederhana Sub Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah	104,625,000.00	104,600,000	100%	
2	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor Berupa Penyediaan Pojok Baca di Kota Padang Sidempuan Pembangunan Gedung Negara Tidak Bertingkat Kelas Sederhana Sub Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenang	104,625,000.00	104,500,000	100%	
3	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor Berupa Penyediaan Pojok Baca di Kota Sibolga Pembangunan Gedung Negara Tidak Bertingkat Kelas Sederhana Sub Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah	104,625,000.00	104,400,000	100%	

4	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor Berupa Penyediaan Pojok Baca di Kab,Simalungun Pembangunan Gedung Negara Tidak Bertingkat Kelas Sederhana SubKegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umumyang Menjadi Kewenangan Daerah	104,625,000.00	104,550,000	100%	
5	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor Berupa Penyediaan Pojok Baca di Kab, Serdang Bedagai Pembangunan Gedung Negara Tidak Bertingkat Kelas Sederhana Sub Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan	104,625,000,00	104,450,000	100%	
6	Belanja Jasa Penyelenggara Acara, Paket Kegiatan Dialog Interaktif Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara dengam Masyarakat secara Langsung maupun Virtual	166,500,000.00	166,500,000	100%	
7	TOT Distance Learning	181,990,480.00	125,204,340	100%	
TOTAL		766,990,480.00	814,204,340.00	100%	

4.1.2.2. Program Prioritas Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat

Pagu Anggaran Rp 16.586.553.829

Nama ODP : Dinas Kesehatan Masyarakat

NO	Kegiatan Mendukung Kegiatan Strategis Daerah (KSD)	Pagu Anggaran/ Kontrak	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik	Kendala & Hambatan
1	Pengadaan Bahan-Bahan Lainnya Dukungan Testing, Tracing, Treatment (3T) Penanganan COVID-19 dan Vaksinasi COVID-19	2,221,880,690	0,00	100%	
2	Penambahan Daya Tahan Tubuh Berupa Penyediaan Penambah Daya Tahan Tubuh/ suplementasi Gizi Pada Dinas Kesehatan	6,064,664,550	6,046,207,500	100%	
3	Pengadaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Berupa Bahan Cetak dan Sewa Baliho Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) GERMAS Melalui Berbagai Media Kebutuhan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara	1,320,000,000	1,316,700,000	100%	
4	Pengadaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Berupa Spanduk Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) GERMAS Melalui Berbagai Media Kebutuhan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara	630,000,000	624,400,000	100%	
5	Pengadaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas Berupa Pakaian Dinas Lapangan Layanan Kesehatan Bergerak Bakti Kesehatan Bermartabat	12,000,000	0,00	100%	
6	Pengadaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor Berupa Kain Sarung Bermotif Kebutuhan Layanan Kesehatan Bergerak Bakti Kesehatan Bermartabat	224,000,000	220,360,000	100%	

7	Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus Berupa Bus Medis (Klinik) Pendukung Layanan Kesehatan Bergerak	3,800,000,000	0,00	100%	
8	Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus Berupa Bus Medis (Rontgen) Pendukung Layanan Kesehatan Bergerak	2,500,000,000	0,00	100%	
9	Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus Berupa Kendaraan Operasional Pendukung Kendaraan Bermotor Mini Bus Pendukung Layanan Kesehatan Bergerak	784,559,034	0,00	100%	
10	Pengadaan Bahan-Bahan Lainnya Untuk Kegiatan Pelayanan Kesehatan Bergerak di Daerah Terpencil/Sangat Terpencil Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara	155,586,400	0,00	100%	
11	Pengadaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor Kebutuhan Pelayanan Kesehatan Bergerak	112,980,000	110,080,000	100%	
12	Pengadaan Obat-Obatan Lainnya Berupa Obat-Obatan Dukungan Layanan Kesehatan Bergerak Bakti Kesehatan Bermartabat (BKB)	79,465,019	0,00	100%	
13	Pengadaan Suku Cadang Alat Kedokteran Penyediaan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) Dukungan Layanan Kesehatan Bergerak Bakti Kesehatan Bermartabat (BKB)	272,003,798	0,00	100%	
14	Pengadaan Bahan-Bahan Lainnya Untuk Kegiatan Pelayanan Kesehatan Bergerak (PKB) Terintegrasi Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara	155,586,400	154,460,000	100%	
15	Pengadaan Obat-Obatan Lainnya Berupa Obat-Obatan Dukungan Layanan Kesehatan Bergerak Bakti Kesehatan Bermartabat (BKB)	79,465,228	0,00	100%	

16	Pengadaan Obat-Obatan Lainnya Berupa Obat-Obatan Dukungan Layanan Kesehatan BergerakBakti Kesehatan Bermartabat (BKB)	429,145,019	36,759,400	21.63%	
TOTAL		18,841,336,138.00	8,508,966,900.00	95,1%	

4.1.2.3. Program Prioritas peningkatan kesempatan kerja dan berusaha melalui penyediaan lapangan pekerjaan

Pagu Anggaran : Rp 873.579.000

Nama ODP : Dinas Perindustrian,Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral

NO	Kegiatan Mendukung Kegiatan Strategis Daerah (KSD)	Pagu Anggaran/ Kontrak	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik	Kendala & Hambatan
1	Pengadaan Mesin dan Peralatan Pendukung Pelatihan Tataboga dan fashionDBHCHT TA. 2023 pada Dinas Perindag ESDM	2,420,270,000	621,729,000	100%	
2	Pengadaan Mesin Air Masak AI-Miza dan Peralatan Pendukung PelatihanPenumbuhan Ekonomi di Sektor Industri Kecil Menengah (IKM) di Kab LabuhanBatu Utara TA. 2023 pada DPPESDM Provsu	2,420,270,000	251,850,000	100%	
TOTAL		4,840,540,000.00	873,579,000.00	100%	

4.1.2.4. Program Prioritas Peningkatan Daya Saing Melalui Sektor Agraris

Pagu Anggaran : Rp 3.652.851.060

Nama ODP : Dinas Kelautan dan Perikanan

NO	Kegiatan Mendukung Kegiatan Strategis Daerah (KSD)	Pagu Anggaran/ Kontrak	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik	Kendala & Hambatan
1	Bantuan Premi Asuransi Nelayan	1,200,000,000	1,200,000,000	100%	
2	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan di Kab. Dairi	71,161,000	63,507,060	100%	
3	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan Di Kab. Samosir	71,161,000	68,000,000	100%	
4	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar - Pengadaan Mesin Inboard 28 PK	324,574,580	318,100,000	100%	
5	Pengadaan Alat Penangkapan Ikan	975,000,000	0,00	0%	
6	Pengadaan Sampan Bermotor Beserta Alat Penangkapan Ikan untuk Nelayan PUD	600,000,000	179,475,000	30%	
7	Belanja Bibit Ikan dalam rangka pengembangan usaha budidaya ikan gurame di Kabupaten Batubara	184,719,000	184,719,000	100%	
8	Belanja bibit ikan dalam rangka pengembangan usaha budidaya ikan Lele di Kab. Batubara	162,275,000	162,275,000	100%	
9	Belanja bibit ikan dalam rangka pengembangan usaha budidaya ikan Kerapu di Kab. Batubara	198,000,000	198,000,000	100%	
TOTAL		3,786,890,580.00	2,374,076,060.00	81,1%	

4.1.2.5. Program Prioritas Peningkatan Daya Saing Melalui Sektor Pariwisata

Pagu Anggaran : Rp 9.017.232.002

Nama DPO : Dinas Kebudayaan,Parawisata dan Ekonomi Kreatif

NO	Kegiatan Mendukung Kegiatan Strategis Daerah (KSD)	Pagu Anggaran/ Kontrak	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik	Kendala & Hambatan
1	Pembayaran Uang Muka 30% Atas Kegiatan Penataan Sarana Danprasarana Serta Fasilitas Umum Pariwisata Di Destinasi Pariwisatasumut Bukit Lawang, Bahorok, Kabupaten Langkat	4,575,310,000	257,497,667,81	30%	
2	Pembayaran Uang Muka 30% Atas Pekerjaan Penataan Sarana Dan Prasarana Serta Fasilitas Umum Pariwisata Di Destinasi Pariwisata Sumut Tangkahan, Batang Serangan, Kabupaten Langkat	4,575,310,000	259,786,562,42	30%	
3	Uang Muka (30%) Revitalisasi Dan Penyediaan Sarana Prasarana Situs Mesjid Azizi Tanjung Pura, Kabupaten Langkat	1,599,967,027,25	469,772,039,17	30%	
4	Pembayaran Uang Muka (30%) Atas Pekerjaan Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor - Penataan Situs Benteng Putri Hijau T.A.2023	2,299,440,000	653,858,372	30%	
5	Pembayaran Uang Muka (30%) Atas Penataan Komplek Situs Bagasgodang Ulu Pungkut, Kab.Madina	1,491,645,000	431,723,145,41	30%	
6	Belanja Modal Tanaman Penataan Situs Benteng Putri Hijau T.A. 2023	197,954,000	195,000,000	100%	
7	Belanja Pendukung Kegiatan Sosialisasi Edukasi Interaktif Terhadap Siswa Sekolah Di Kawasan Toba Caldera Uggp Ta.2023	96,688,781	96,100,470	100%	
8	Belanja Pendukung Kegiatan Sosialisasi Mitigasi Bencana Alam Dan Perubahan Iklim Di Kspn Danau Toba T.A.2023	82,562,677	82,478,106	100%	

9	Belanja Pendukung Kegiatan Pelatihan Pemandu Wisata Di Geositetoba Caldera Uggp.	195,695,775	192,068,739	100%	
10	Sosialisasi Digitalisasi Pemasaran Pariwisata	116,370,450	116,006,433	100%	
11	Pelaksanaan Sosialisasi Digitalisasi Pemasaran Di Kabupaten Simalungun (Belanja Eo)	116,370,450	115,866,795	100%	
12	Pengadaan Bahan Kegiatan Digitalisasi Promosi Pariwisata (Brosurdan Papan Nama)	84,000,000	82,695,000	100%	
13	Partisipasi Pelaksanaan Event Pariwisata Dalam Dan Luar Negeri - Sewa Stand Pada Pameran Inacraft	60,000,000	60,000,000	100%	
14	Pembuatan Pengembangan Aplikasi Digitalisasi Promosi Pariwisata	150,000,000	149,922,150	100%	
15	Belanja Modal Peralatan Jaringan - Pembuatan Website Digitalisasi Promosi Pariwisata	194,670,000	194,483,100	100%	
16	Pelaksanaan Sosialisasi Digitalisasi Pemasaran Di Kabupaten Tapanuli Selatan	116,370,450	114,074,811	100%	
17	Pelaksanaan Sosialisasi Digitalisasi Pemasaran Di Kabupaten Nias Utara	118,343,572	118,343,572	100%	
18	Pengadaan Alat Digitalisasi Promosi Pariwisata (Digital Signage)	129,780,000	129,759,000	100%	
19	Pelaksanaan Sosialisasi Digitalisasi Pemasaran Di Kabupaten Batu Bara (Belanja EO)	118,534,014	117,970,578	100%	
20	Sewa Tempat Pemasangan Iklan Pariwisata (Videotron)	95,000,000	92,685,000	100%	
21	Belanja Event Organizer Rakor Pemasaran Dan Promosi Pariwisata	95,569,335	95,002,125	100%	
22	Penyediaan Akomodasi Dan Makan Minum Rakor Pemasaran Dan Promosi Pariwisata	155,203,530	154,678,500	100%	
TOTAL		15,064,818,034	2,760,992,751.00	78,1%	

4.1.2.6. Program Prioritas Peningkatan Kualitas Reformasi Birokrasi

Pagu Anggaran : Rp 425.698.000

Nama DPO : Badan Keuangan dan Aset Daerah

NO	Kegiatan Mendukung Kegiatan Strategis Daerah (KSD)	Pagu Anggaran/ Kontrak	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik	Kendala & Hambatan
1	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	64,000,000	64,000,000	100%	
2	Kegiatan Penginputan Form Praktik Baik Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pada Perangkat Daerah	8,480,000	8,480,000	100%	
3	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	155,900,000	99,760,000	100%	
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	199,680,000	190,208,000	100%	
5	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan - Sosialisasi Evaluasi SAKIP Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	182,700,000	63,250,000	100%	
TOTAL		610,760,000	425,698,000	100%	

4.1.2.7. Program Prioritas Peningkatan Sosial Kemasyarakatan dan Olahraga

Pagu Anggaran : Rp 65.070.470.043

Nama DPO : Dinas Komunikasi dan Informatika

NO	Kegiatan Mendukung Kegiatan Strategis Daerah (KSD)	Pagu Anggaran/ Kontrak	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik	Kendala & Hambatan
1	Biaya Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan Internet Lisensi Aplikasi untuk bulan Januari - Juni 2023	96,678,769	96,678,769	100%	
2	Konsultan Perencana Pembangunan Akses Jalan Menuju Proyek Stadion untuk kebutuhan PON XXI 2024 Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi\ Kosultansi Perencanaan Pembangunan Akses Jalan	100,000,000	99,567,000	100%	
3	Pembangunan Akses Jalan Menuju Proyek Stadion untuk kebutuhan PON XXI2024 1 Paket Jalan Lingkungan Beton 2,5 M	5,186,404,440	1,529,767,282	13%	
4	Fasilitasi Pembinaan Mental dan Spiritual	140,435,000,000	10,090,000,000	100%	
5	Fasilitasi Pembinaan Mental dan Spiritual	140,435,000,000	13,840,000,000	100%	
6	Fasilitasi Pembinaan Mental dan Spiritual	140,435,000,000	6,473,000,000	100%	
7	Fasilitasi Pembinaan Mental dan Spiritual	140,435,000,000	1,830,000,000	100%	
8	Fasilitasi Pembinaan Mental dan Spiritual	140,435,000,000	3,320,000,000	100%	
9	Fasilitasi Pembinaan Mental dan Spiritual	140,435,000,000	400,000,000	100%	
10	Fasilitasi Pembinaan Mental dan Spiritual	140,435,000,000	2,980,000,000	100%	
11	Fasilitasi Pembinaan Mental dan Spiritual	140,435,000,000	150,000,000	100%	
12	Fasilitasi Pembinaan Mental dan Spiritual	140,435,000,000	700,000,000	100%	
13	Fasilitasi Pembinaan Mental dan Spiritual	140,435,000,000	5,135,000,000	100%	
14	Fasilitasi Pembinaan Mental dan Spiritual	140,435,000,000	2,100,000,000	100%	

15	Fasilitasi Pembinaan Mental dan Spiritual	140,435,000,000	3,425,000,000	100%	
16	Fasilitasi Pembinaan Mental dan Spiritual	140,435,000,000	700,000,000	100%	
17	Fasilitasi Pembinaan Mental dan Spiritual	140,435,000,000	1,125,000,000	100%	
18	Fasilitasi Pembinaan Mental dan Spiritual	140,435,000,000	1,875,000,000	100%	
19	Fasilitasi Pembinaan Mental dan Spiritual	140,435,000,000	130,000,000	100%	
20	Fasilitasi Pelayanan Dasar	140,435,000,000	532,000,000	100%	
21	Fasilitasi Pembinaan Mental dan Spiritual	140,435,000,000	4,770,000,000	100%	
22	Fasilitasi Pembinaan Mental dan Spiritual	140,435,000,000	1.350.000.000	100%	
23	Fasilitasi Pembinaan Mental dan Spiritual	140,435,000,000	515.000.000	100%	
24	Fasilitasi Pembinaan Mental dan Spiritual	140,435,000,000	2.715.000.000	100%	
25	Fasilitasi Pelayanan Dasar	150.707.000.000	80.000.000	100%	
26	Fasilitasi Pembinaan Mental dan Spiritual	140,435,000,000	1.490.000.000	100%	
27	Fasilitasi Pembinaan Mental dan Spiritual	140,435,000,000	4.291.000.000	100%	
28	Fasilitasi Pembinaan Mental dan Spiritual	140,435,000,000	5.650.000.000	100%	
29	Fasilitasi Pembinaan Mental dan Spiritual	140,435,000,000	540.000.000	100%	
30	Fasilitasi Pembinaan Mental dan Spiritual	140,435,000,000	3.169.000.000	100%	
31	Fasilitasi Pembinaan Mental dan Spiritual	140,435,000,000	2.385.000.000	100%	
32	Fasilitasi Pembinaan Mental dan Spiritual	140,435,000,000	653.000.000	100%	
33	Fasilitasi Pembinaan Mental dan Spiritual	140,435,000,000	0,00 Persen : 0 %	100%	
34	Fasilitasi Pembinaan Mental dan Spiritual	140,435,000,000	1.420.000.000	100%	
TOTAL		4.218.433.083.209	85.559.013.051	93,7%	

4.1.2.8. Program Prioritas Pembangunan Infrastruktur Yang Baik Dan Berwawasan Lingkungan

Pagu Anggaran : Rp 1,845,503,452,640

Nama ODP : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO	Kegiatan Mendukung Kegiatan Strategis Daerah (KSD)	Pagu Anggaran/ Kontrak	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik	Kendala & Hambatan
1	Pembangunan Jalan dan Jembatan Provinsi untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi Sumatera Utara	1,500,000,000,000	226,265,019,355	52,76%	
2	PHJD Ruas Jalan Sp, Situnggaling - Tongging - Bts, Dairi di Kab, Karo	30,329,377,415	16,926,277,608	24,17%	
3	PHJD Ruas Jalan Sp, Lae Pandom - Sialahi - Bts, Karo di Kab, Dairi	15,775,000,000	7,858,147,729	62,88%	
4	PHJD Ruas Jalan Bakkara - Janji Raja di Kab, Humbang Hasundutan	15,251,550,000	5,799,699,838	45,18%	
5	Penanganan Long Segment (Pemeliharaan Rutin, Pemeliharaan Berkala, Peningkatan/Rekonstruksi) pada Ruas Balige - Tara Bunga- Meat (Batas Taput) di Kab, Toba (DAK)	26,228,981,000	6,431,662,488	40,15%	
6	Penanganan Long Segment (Pemeliharaan Rutin, Pemeliharaan Berkala, Peningkatan/Rekonstruksi) pada Ruas Siborongborong - Sipahutar di Kab, Tapanuli Utara (DAK)	10,832,311,000	2,636,618,728	89 %	
7	Pembangunan Saluran Drainase pada ruas jalan Aek Nabara Tonga - Sibuhuan di Kab, Padang Lawas	198,500,000	198,250,000	100 %	
8	Pembangunan Tembok Penahan pada Ruas Jalan Aek Nabara Tonga - Sibuhuan di Kab, Padang Lawas	200,000,000	199,800,000	100 %	
9	Pembangunan Tembok Penahan pada Ruas Jalan Binanga - Aek Nabara Tonga di Kab, Padang Lawas	200,000,000	199,850,000	100 %	

10	Pembangunan Tembok Penahan pada Ruas Jalan Paringgonan - Sibuhuan di Kab, Padang Lawas	200,000,000	199,875,000	100 %	
11	Pembangunan Tembok Penahan pada Ruas Jalan Sihaporas - Paringgonan di Kab, Padang Lawas	200,000,000	199,850,000	100 %	
12	Penanganan Long Segment (Pemeliharaan Rutin, Pemeliharaan Berkala, Peningkatan/Rekonstruksi) pada Ruas Lahewa - Afulu (DAK)	16,701,983,000	3,308,280,800	-	
13	Pembayaran Uang Muka 50% Pembangunan PLTS Pompa Air Mendukung Program Terintegrasi Peningkatan Produktivitas Pertanian Sumut 5	4,532,239,190	710,490,169	50 %	
14	Pembayaran Lunas (100%) Pembangunan PLTS Pompa Air Mendukung Program Terintegrasi Peningkatan Produktivitas Pertanian Sumut 5	4,532,239,190	710,490,168	100 %	
15	Pembayaran Uang Muka 50% Pembangunan PLTS Pompa Air Mendukung Program Terintegrasi Peningkatan Produktivitas Pertanian Sumut 6 pada Dinas Perindag ESDM Provsu	4,532,239,190	774,468,071	50 %	
16	Pembayaran Uang Muka 50% Pembangunan PLTS Pompa Air Mendukung Program Terintegrasi Peningkatan Produktivitas Pertanian Sumut 7 pada Dinas Perindag ESDM Provsu	4,532,239,190	770,716,459	50 %	
17	Konsultan Supervisi Peningkatan Jaringan Irigasi pada DI Mombang Boru (Pendukung DAK) Konsultan Supervisi	100,000,000	0,00	-	
18	Konsultan Supervisi Peningkatan Jaringan Irigasi pada DI Panombean/Panei Tongah/Bah Kata (Pendukung DAK) Konsultan Supervisi	100,000,000	0,00	-	
19	Konsultan Supervisi Peningkatan Jaringan Irigasi pada DI Simodong (Pendukung DAK) Konsultan Supervisi	100,000,000	0,00	-	

20	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan D,I, Medan Krio Kec, Sunggal, Kab, Deli Serdang - Peningkatan Saluran Sekunder Sepanjang 400 m	998,514,720	289,578,293	80,24%	
21	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan D,I, Namo Rambe, Kec, Namo Rambe, Kab, Deli Serdang - Peningkatan Saluran Sekunder Sepj, 120 m	998,514,720	296,562,021	60,36%	
22	Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa D,I,R, Percut, Kec, Percut Sei Tuan, Kab, Deli Serdang - Peninggian Tanggul Pada Paluh 80 Sepanjang 400m	990,123,840	292,684,500	80,19%	
23	Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa D,I,R, Sisir Gunting, Kec, Hamparan Perak, Kab, Deli Serdang - Peninggian Saluran Paluh Babi, Paluh Kurau Sepj, 3500m; Normalisasi Saluran Pembangunan Sepj, 4000m	990,123,840	291,831,588	80,42%	
24	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan D,I, Bah Tonang Kec, Sipispis, Kab, Serdang Bedagai [-] Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan pada Daerah Irigasi Bah Tonang, Kec, Sipispis, Kab, Serdang Bedagai, Rehab, Saluran Sekunder Sepj, 410m	998,514,720	278,716,194	42,05%	
25	Pembayaran Lunas 100% Pembangunan PLTS Pompa Air mendukung Program Terintegrasi Peningkatan Produktivitas Pertanian Sumut 7 pada DPESDM Provsu TA, 2023	4,532,239,190	770,716,460	100 %	
26	Pembayaran Lunas 100% Pembangunan PLTS Pompa Air mendukung Program Terintegrasi Peningkatan Produktivitas Pertanian Sumut 6 pada DPESDM Provsu TA, 2023	4,532,239,190	774,468,071	100 %	
27	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan D,I, Pekan Dolok, Kec, Dolok Masihul, Kab, Sergei [-] Peningkatan Jaringan Irigasi D,I, Pekan Dolok; Pembuatan Pasangan Saluran Primer 800m;	6,171,492,240	1,480,911,548,61	23,09%	

	Pembuatan Pasangan Saluran Sekunder 600m; dan Perbaikan Pintu Banguna				
28	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan D,I, Panombean/P, Tongah/Bah Kata, Kec,Panombean Panei, Kab, Simalungun (DAK)	3,526,791,750	832,350,561	27 %	
29	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan pada Daerah Irigasi Parit Lompaten 1,242 Ha (Saluran Sekunder Sukababo) [-] Konsultan Pengawasan (DAU) - Daerah Irigasi Parit Lompaten 1,242 Ha Kecamatan Juhar Kabupaten Karo (3,059419 - 98,324123)	70,000,000	0,00	3,33%	
30	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan D,I, Simodong, Kec, Sei Suka, Kab, Batu Bara [-] Pembuatan Pasangan Saluran Sekunder Sepj, 3,500 m; Perbaikan Bangunan Bagi 1 Buah; Perbaikan Pintu Bangunan Bagi 17 Bh (DAK)	7,999,978,000	1,954,184,000	19 %	
31	Normalisasi Saluran D,I Cinta Maju/ Damai [-] Normalisasi Saluran D,I Cinta Maju/ Damai Sepj, 2,000 M	199,154,633	0,00	100 %	
32	Normalisasi Saluran D,I Serbangan [-] Normalisasi Saluran D,I Serbangan Sepj, 2,000 M	199,154,633	0,00	100 %	
33	Normalisasi Saluran D,I Tanjung Muda [-] Normalisasi Saluran D,I Tanjung Muda Sepj, 2,000 M	141,709,585	0,00	100 %	
34	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi pada D,I PANCA ARGAN Kecamatan Rawang Panca Arga Kab, Asahan; [-] Normalisasi Saluran Pembuang	194,728,974	0,00	50 %	
35	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi pada D,I SERBANGAN Kecamatan Rawang Panca Arga Kab, Asahan [-] Normalisasi Saluran Pembuang	194,728,974	0,00	100 %	
36	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi pada D,I SIJAMBI Kecamatan Simpang Empat Kab,Asahan; [-] Normalisasi Saluran Pembuang	194,728,974	0,00	90 %	

37	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi pada D,I SUKA MAKMUR Kec, Pulo Bandring Kab,Asahan; [-] Normalisasi Saluran Sekunder	194,728,974	0,00	100 %	
38	Pemeliharaan Sayap Bendung D,I Purwodadi (DAU)	193,227,838	192,494,000,00	100 %	
39	Pemeliharaan Sayap Bendung D,I Tanjung Muda (DAU)	193,227,838	95,927,000,00	90 %	
40	Pemeliharaan Berkala pada DIR, Cinta Makmur Desa Selat Besar, Kec, Bilah Hilir Kab, Labuhanbatu - Normalisasi Saluran Pembuang Saluran Selat Tengah 2000 m	199,154,633	119,151,100	82,29%	
41	Pemeliharaan Berkala pada DIR, Cinta Makmur Desa Tanjung Serang Elang, Kec, Panai Hulu Kab, Labuhanbatu - Normalisasi Saluran Pembuang Saluran Abadi 2000 m	199,154,633	119,143,200	91,12%	
42	Pemeliharaan Berkala pada DIR, Sei Rakyat/Sei Serdang Desa Bagan Bilah, Kec, Panai Tengah Kab, Labuhanbatu - Normalisasi Saluran Pembuang Saluran Sei Cina II sepj, 2000 m	199,154,633	119,051,500	91,12%	
43	Pemeliharaan Berkala pada DIR, Sei Rakyat/Sei Serdang Desa Sei Rakyat, Kec, Panai Tengah Kab, Labuhanbatu - Normalisasi Saluran Pembuang Saluran Sei Cina I sepj 2000 m	199,154,633	119,060,500	91,12%	
44	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi pada DI, Hutapaung/Parmiahhan Kec, Pollung Kab,Humbang Hasundutan - Perbaikan Saluran Sepj, 110 m	199,314,192	198,875,800	100 %	
45	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi pada DI, Lobu Tua Kec, Lintong Nihuta Kab,Humbang Hasundutan - Perbaikan Saluran Sepj, 77 m - Perbaikan bangunan sadap 1 bh - Normalisasi Saluran sepj, 1000 m	199,314,192	198,328,300	100 %	

46	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan D,I, Mombang Boru, Kec, Sibabangun, Kab, Tapteng Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan D,I, Mombang Boru, Kec, Sibabangun, Kab, Tapteng (DAK) '- Saluran Primer Sepj, 150 m' '- Saluran Sekunder Sepj, 1,170 m' '	3,500,000,000	987,408,288	8,8%	
47	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi pada DI, Hasak I dan II Kec, Tarutung Kab,Tapanuli Utara - Perbaikan Saluran Sepj, 64 m	200,000,000	0,00	70 %	
48	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi pada DI, Sidilnitano Kiri-Kanan Paket II Kec,Siborong-borong Kab,Tapanuli Utara [-] Pemeliharaan Tanggul Saluran	199,971,337	0,00	90 %	
49	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi pada DI, Sidilnitano Kiri-Kanan Paket I Kec,Siborong-borong Kab,Tapanuli Utara [-] Perbaikan Saluran Sepj, 45 m , Normalisasi Saluran Sepj, 1,000 m	200,000,000	0,00	100 %	
50	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Pada DI, Simangatasi II Kec, Silaen Kab, Toba - Perbaikan Saluran Sepj, 83 m	199,314,192	0,00	100 %	
51	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi pada DI, Simok-mok Kec, Siborong-borong Kab,Tapanuli Utara - Perbaikan Saluran Sepj, 74 m - Tanggul Saluran Sepj, 7 m - Perbaikan Pintu 1 bh	199,314,192	0,00	-	
52	Konsultan Manajemen Konstruksi (MK), Supervisi dan Pengawasan (DAK)	2,538,080,000	608,120,438	50,12%	

53	Pembangunan Transmisi Air Curah Untuk SPAM Regional Mebidang; Pengembangan Jaringan Distribusi Utama (JDU) Helvetia (Kec, Helvetia, Sunggal) Jaringan Perpipaan Sepanjang 6,906 m (375 l/det) (DAK)	51,478,202,441	7,579,488,568	15,6%	
54	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Pengembangan Infrastruktur SPAM Kawasan Permukiman di Kec, Tanah Jawa Kab, Simalungun; Terbangunnya 1 (satu) sistem jaringan air minum sep, 3000m,	80,000,000	79,809,000	100 %	
55	Pengembangan Infrastruktur SPAM Kawasan Permukiman di Kec, Tanah Jawa Kab, Simalungun; Terbangunnya 1 (satu) sistem jaringan air minum sep, 3000m, konsultan perencanaan teknis (DED, Amdal, SID	50,000,000	49,810,140	100 %	
56	Pembangunan SPAM Kawasan MBR di Kec, Hutaimbaru Kota Padang Sidempuan	1,243,404,000	357,586,500	49 %	
57	Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Kawasan Wisata Religi Babussalam Desa Besilam Kabupaten Langkat	300,000,000	198,032,325	100 %	
58	Pekerjaan Penataan Kawasan Wisata Religi Babussalam Desa Besilam Terintegrasi	7,055,217,980	4,710,196,169	70 %	
59	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (lima belas) Ha di Sei Bilah Kab, Langkat A	4,248,063,124	2,676,244,777	95 %	
60	Pembayaran Uang Muka 50% untuk Pekerjaan Belanja Hibah Pemasangan Sambungan Listrik baru bagi Rumah Tangga tidak mampu di Wilayah Kerja Wilayah I	12,312,500,000	461,666,760	50 %	

61	Pembayaran Uang Muka 50% untuk Pekerjaan Belanja Hibah Pemasangan Sambungan Listrik baru bagi Rumah Tangga tidak mampu di Wilayah Kerja Wilayah V	12,312,500,000	602,752,200	50 %	
62	Pembayaran Uang Muka 50% untuk Pekerjaan Belanja Hibah Pemasangan Sambungan Listrik baru bagi Rumah Tangga tidak mampu di Wilayah Kerja Wilayah III	12,312,500,000	1,194,082,500	50 %	
63	Pembayaran Uang Muka 30% untuk Pekerjaan Pemasangan Sambungan Listrik baru bagi Rumah Tangga tidak mampu di Wilayah Kerja Wilayah VI DPPESDM Provsu	12,312,500,000	696,330,473	30 %	
64	Pembayaran Uang Muka 30% untuk Pekerjaan Pemasangan Sambungan Listrik baru bagi Rumah Tangga tidak mampu di Wilayah Kerja Wilayah VII DPPESDM Provsu	12,312,500,000	394,999,605	30 %	
65	Pembayaran Uang Muka 30% untuk Pekerjaan Pemasangan Sambungan Listrik baru bagi Rumah Tangga tidak mampu di Wilayah Kerja Wilayah II DPPESDM Provsu	12,312,500,000	539,385,075	30 %	
66	Pembayaran Pelunasan (100%) Pemasangan Sambungan Listrik baru bagi RTS di Wilayah Kerja Wilayah I pada DPPESDM Provsu TA, 2023	12,312,500,000	461,666,760	100 %	
67	Pembayaran Lunas (100%) Pemasangan Sambungan Listrik baru bagi Rumah Tangga tidak mampu di Wilayah Kerja Wilayah III pada DPPESDM Provsu TA, 2023	12,312,500,000	1,194,082,500	100 %	
68	Pembayaran Lunas di kurangi Uang Muka dari Nilai Kontrak pekerjaan Pemasangan Sambungan Listrik baru bagi Rumah Tangga Tidak mampu di Wilayah Kerja Wilayah II pada DPPESDM Provsu TA, 2023	12,312,500,000	1,258,565,175	100 %	

69	Pembayaran Lunas di kurangi Uang Muka dari Nilai Kontrak pekerjaan Pemsangan Sambungan Listrik barui bagi Rumah tangga Tidak mampu di Wilayah Kerja Wilayah VII pada DPPESDM Provsu TA, 2023	12,312,500,000	921,665,745	100 %	
70	Pembayaran Lunas di kurangi Uang Muka dari Nilai Kontrak pekerjaan Pemsangan Sambungan Listrik barui bagi Rumah tangga Tidak mampu di Wilayah Kerja Wilayah VI pada DPPESDM Provsu TA, 2023	12,312,500,000	1,624,771,102	100 %	
71	Pembayaran Lunas di kurangi Uang Muka dari Nilai Kontrak pekerjaan Pemsangan Sambungan Listrik barui bagi Rumah tangga Tidak mampu di Wilayah Kerja Wilayah IV pada DPPESDM Provsu TA, 2023	12,312,500,000	1,260,313,425	100 %	
72	Penataan Alun-Alun Kota Pematang Siantar Taman Alun-Alun.	4.800.000.000	1.367.006.523	12%	
73	Pembangunan Baru Non Standar Gedung Negara Klasifikasi Tidak Sederhana - Rumah Sakit Haji.	117.275.839.500	84.665.651.784	87%	
74	Pemeliharaan Berkala pada DIR. Cinta Makmur Desa Selat Besar, Kec. Bilah Hilir Kab. Labuhanbatu - Normalisasi Saluran Pembuang Saluran Karang Anyar Sepj. 2000 m.	199.154.633	119.048.300	91%	
TOTAL		2,010,772,390,123.00	392,485,876,110	19.52	

4.2. Analisis Data (Realisasi)

4.2.1. Capaian Program Prioritas Juli 2023

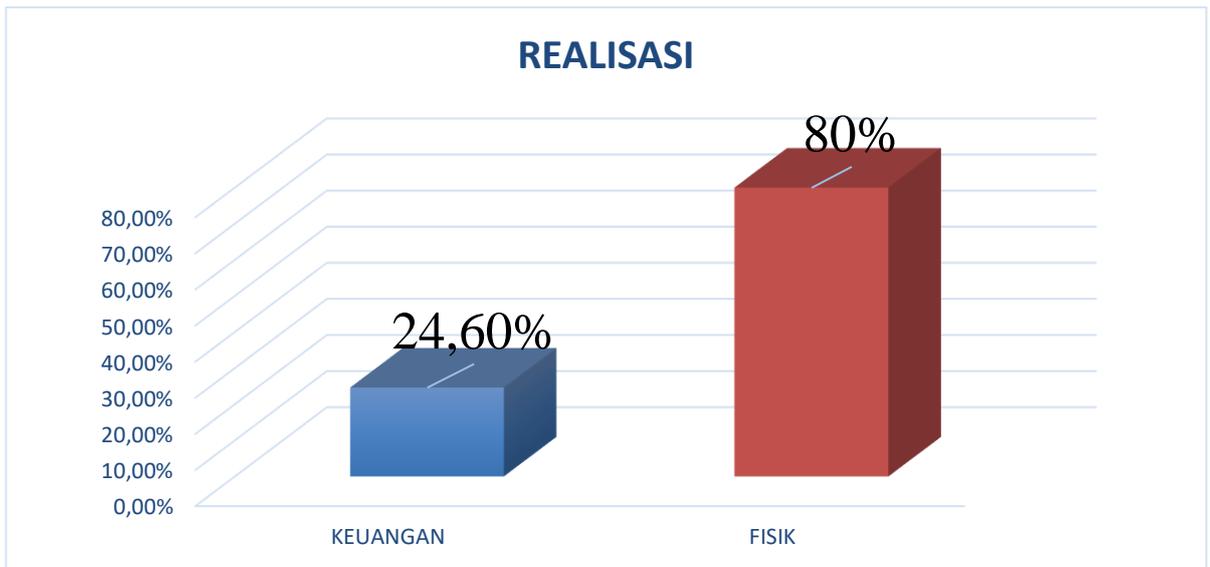
Dari capaian kegiatan dalam hal pencapaian delapan program prioritas yang ada di bulan juli 2023 hanya empat program prioritas yang masih tersedia data administrasinya diantara sebagai berikut:

- a. Program prioritas peningkatan daya saing melalui sector pariwisata
- b. Program prioritas kualitas reformasi
- c. Program prioritas Peningkatan Sosial Kemasyarakatan Dan Olah Raga
- d. Program Prioritas Pembangunan Infrastruktur Yang Baik Dan Berwawasan Lingkungan

4.2.1.1. Ketercapaian Program Prioritas Peningkatan Daya Saing Melalui Sektor Pariwisata

Bidang : Pariwisata	Aspek : Daya Saing Pariwisata
OPD	Dinas Kebudayaan, Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
Pagu anggaran tahun 2023	Rp.9.017.232.002
Realisasi Keuangan (Rp)	Rp. 2.218.390.037
Realisasi Keuangan (%)	24.6%
Program	Prioritas peningkatan daya saing melalui sektor pariwisata Kegiatan: 1. Pengembangan kawasan pariwisata, meliputi ekowisata tangkahan, bahorok/ bukit lawang - langkat; agrowisata ulu pungkut - madina; wisata alam dan budaya - kepulauan nias; wisata religi dan sejarah baru – tapanuli tengah; wisata religi dan sejarah candi bahal – padang lawas utara 2. Dukungan penataan cagar budaya kesultanan langkat, situs benteng putri hijau, bawomataluo dan lapangan merdeka medan 3. Dukungan pengembangan destinasi pariwisata super prioritas danau toba melalui pemenuhan 6 (enam) rekomendasi UNESCO dalam rangka mempertahankan status UNESCO Global Geopark Kaldera Toba; 4. Digitalisasi Promosi Pariwisata

Realisasi Fisik	80%
Kendala/Hambatan Ketercapaian	
Kesimpulan	Masih ada 5 kegiatan yang dalam proses pengerjaan dan 17 kegiatan sudah di selesaikan



4.2.1.2. Ketercapaian Program Prioritas Peningkatan Kualitas Reformasi Birokrasi

Bidang : Reformasi Birokrasi	Aspek : Peningkatan Kualitas reformasi birokrasi
OPD	Inspektorat Provinsi Sumatera Utara
Pagu anggaran tahun 2023	Rp. 63.250.000,00
Realisasi Keuangan (Rp)	Rp. 0
Realisasi Keuangan (%)	0%
Program	Peningkatan Kualitas Reformasi Birokrasi

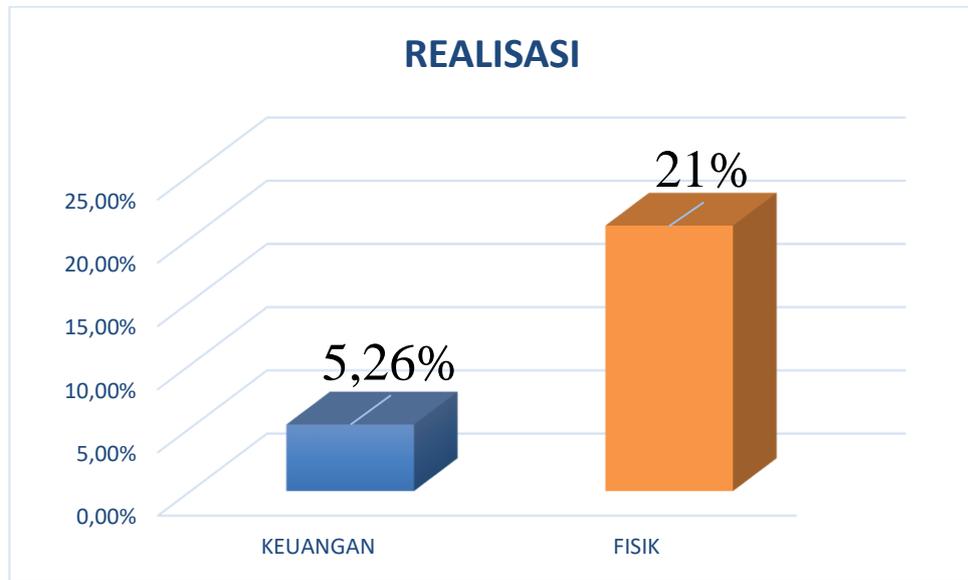
	Kegiatan: 1. Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan - Sosialisasi Evaluasi SAKIP Pemerintah Provinsi Sumatera Utara
Realisasi Fisik	100%
Kendala/Hambatan Ketercapaian	
Kesimpulan	



4.2.1.3. Ketercapaian Program Prioritas Peningkatan Sosial Kemasyarakatan Dan Olah Raga Dan Prioritas Pembangunan Infrastruktur Yang Baik Dan Berwawasan Lingkungan

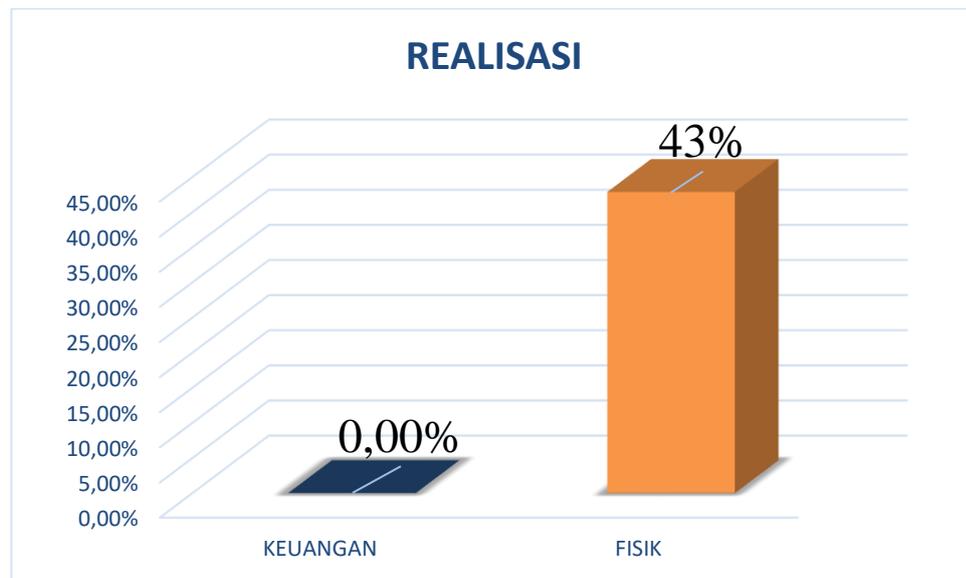
Bidang : Sosial Kemasyarakatan	Aspek : Peningkatan
OPD	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Pagu anggaran tahun 2023	Rp. 1.818.510.862.710.-
Realisasi Keuangan (Rp)	Rp. 95.698.555.853.-
Realisasi Keuangan (%)	5,26%

Program	<p>Sosial Kemasyarakatan Dan Olah Raga dan pembangunan infrastruktur</p> <p>Kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kosultasi Perencanaan Pembangunan Akses Jalan Menuju Proyek Stadion untuk Kebutuhan PON XXI 2024 2. Pembangunan Akses Jalan Menuju Proyek Stadion untuk kebutuhan PON XXI 2024 1 Paket Jalan Lingkungan Beton 2,5 M 3. Supervisi Pembangunan Akses Jalan Menuju Proyek Stadion untuk kebutuhan PON XXI 2024 4. Penanganan jalan strategis provinsi dalam kondisi baik yang meliputi jalan strategis kawasan wisata, kawasan pusat produktivitas, perkotaan dan kawasan daerah tertinggal sepanjang 218,22 (dua ratus delapan belas koma dua puluh dua) kilometer dan pencapaian tingkat kemantapan jalan provinsi sumatera utara sampai dengan 85 (delapan puluh lima) persen 5. Optimalisasi jaringan irigasi sebesar lebih kurang 65.000 (enam puluh lima ribu) hektar 6. Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Mebidang
Realisasi Fisik	20,99%
Kendala/Hambatan Ketercapaian	Sebanyak 56 kegiatan 5 belum berkontrak, 21 sudah berkontrak, 7 pekerjaan belum dimulai, 28 kegiatan sedang dalam proses dan 16 telah menyelesaikan pekerjaan
Kesimpulan	Pekerjaan masih berlangsung



4.2.1.4. Ketercapaian Program Prioritas peningkatan derajat kesehatan masyarakat

Bidang : Kesehatan	Aspek : Derajat Kesehatan Masyarakat
OPD	Dinas Kesehatan
Pagu anggaran tahun 2023	Rp. 9.771.848.000
Realisasi Keuangan (Rp)	Rp. 0
Realisasi Keuangan (%)	0%
Program	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat Kegiatan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Penanganan covid-19 melalui penguatan pola 3T (testing, tracing, treatment), percepatan vaksinasi, penyediaan obat – obatan, penguatan kapasitas rumah sakit dan pemberian insentif bagi tenaga medis 2. Kampanye Gerakan Masyarakat Sehat (GERMAS) melalui peningkatan Komunikasi, Informasi Dan Edukasi (KIE) pada masyarakat di 33 (tiga puluh tiga) kabupaten/kota se-sumatera utara 3. Layanan kesehatan bergerak melalui pengadaan 8 (delapan) unit mobil medis/bus kesehatan.
Realisasi Fisik	42,86%
Kendala/Hambatan Ketercapaian	
Kesimpulan	



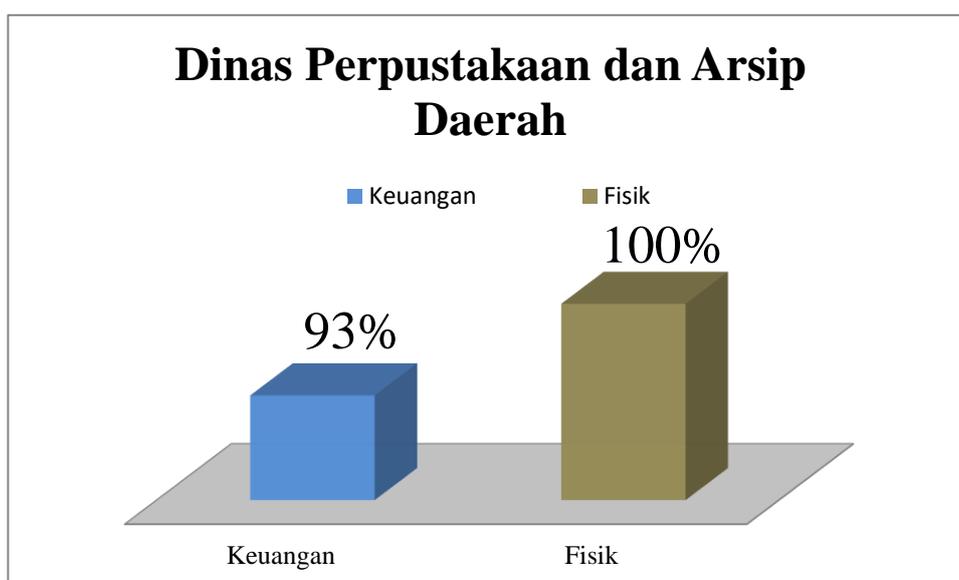
4.2.2. Capaian Progres Prioritas September 2023

Adapun capaian progress prioritas pada bulan September 2023 sudah delapan prioritas diantaranya sebagai berikut:

4.2.2.1. Program Prioritas Pembangunan Peningkatan dan Pemenuhan Akses Pendidikan

Bidang : Pendidikan	Aspek : Peningkatan dan Pemenuhan Akses Pendidikan
OPD	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provsu
Pagu anggaran tahun 2023	Rp 870,990,480
Realisasi Keuangan (Rp)	Rp. 814,204,340.00
Realisasi Keuangan (%)	93%
Program	<p>Prioritas Pembangunan Peningkatan dan Pemenuhan Akses Pendidikan</p> <p>Kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor Berupa Penyediaan Pojok Baca di Kab, NiasUtara Pembangunan Gedung Negara Tidak Bertingkat Kelas Sederhana Sub Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah. 2. Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor Berupa Penyediaan Pojok Baca di Kota Padang Sidempuan Pembangunan Gedung Negara Tidak Bertingkat Kelas Sederhana Sub Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenang.

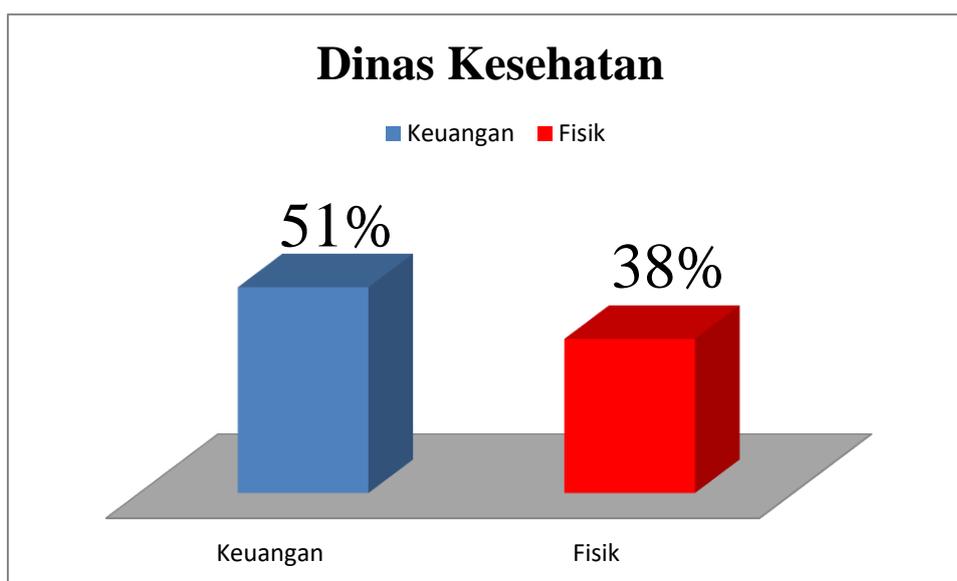
	<ol style="list-style-type: none"> 3. Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor Berupa Penyediaan Pojok Baca di Kota Sibolga Pembangunan Gedung Negara Tidak Bertingkat Kelas Sederhana Sub Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah. 4. Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor Berupa Penyediaan Pojok Baca di Kab,Simalungun Pembangunan Gedung Negara Tidak Bertingkat Kelas Sederhana SubKegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umumyang Menjadi Kewenangan Daerah. 5. Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor Berupa Penyediaan Pojok Baca di Kab, Serdang Bedagai Pembangunan Gedung Negara Tidak Bertingkat Kelas Sederhana Sub Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan. 6. Belanja Jasa Penyelenggara Acara, Paket Kegiatan Dialog Interaktif Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara dengan Masyarakat secara Langsung maupun Virtual. 7. TOT Distance Learning
Realisasi Fisik	100%
Kendala/Hambatan Ketercapaian	
Kesimpulan	Masih ada Pagu Anggaran yang belum terealisasi sebanyak 7%



4.2.2.2. Program Prioritas Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat

Bidang : Kesehatan	Aspek : Derajat Kesehatan Masyarakat
OPD	Dinas Kesehatan
Pagu anggaran tahun 2023	Rp 16.586.553.829
Realisasi Keuangan (Rp)	Rp. 8,508,966,900
Realisasi Keuangan (%)	51%
Program	<p>Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat</p> <p>Kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadaan Bahan-Bahan Lainnya Dukungan Testing, Tracing, Treatment (3T) Penanganan COVID-19 dan Vaksinasi COVID-19. 2. Penambahan Daya Tahan Tubuh Berupa Penyediaan Penambah Daya Tahan Tubuh/ suplementasi Gizi Pada Dinas Kesehatan. 3. Pengadaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Berupa Bahan Cetak dan Sewa Baliho Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) GERMAS Melalui Berbagai Media Kebutuhan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara. 4. Pengadaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Berupa Spanduk Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) GERMAS Melalui Berbagai Media Kebutuhan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara. 5. Pengadaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas Berupa Pakaian Dinas Lapangan Layanan Kesehatan Bergerak Bakti Kesehatan Bermartabat. 6. Pengadaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor Berupa Kain Sarung Bermotif Kebutuhan Layanan Kesehatan Bergerak Bakti Kesehatan Bermartabat. 7. Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus Berupa Bus Medis (Klinik) Pendukung Layanan Kesehatan Bergerak. 8. Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus Berupa Bus Medis (Rontgen) Pendukung Layanan Kesehatan Bergerak. 9. Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus Berupa Kendaraan Operasional Pendukung Kendaraan Bermotor Mini Bus Pendukung Layanan Kesehatan Bergerak. 10. Pengadaan Bahan-Bahan Lainnya Untuk Kegiatan Pelayanan Kesehatan Bergerak di Daerah Terpencil/Sangat Terpencil Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara. 11. Pengadaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor Kebutuhan Pelayanan Kesehatan Bergerak. 12. Pengadaan Obat-Obatan Lainnya Berupa Obat-Obatan Dukungan Layanan Kesehatan Bergerak Bakti Kesehatan Bermartabat (BKB). 13. Pengadaan Suku Cadang Alat Kedokteran Penyediaan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) Dukungan Layanan Kesehatan

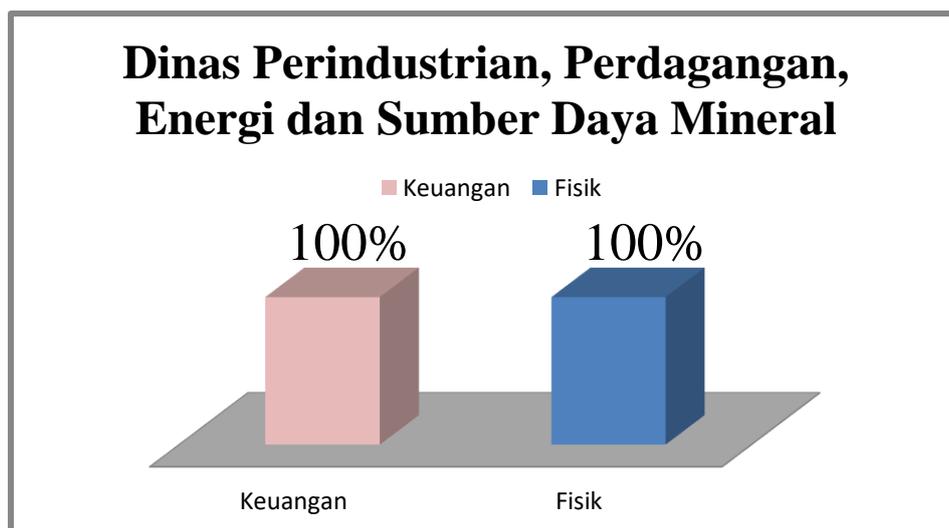
	<p>Bergerak Bakti Kesehatan Bermartabat (BKB).</p> <p>14. Pengadaan Bahan-Bahan Lainnya Untuk Kegiatan Pelayanan Kesehatan Bergerak (PKB) Terintegrasi Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara.</p> <p>15. Pengadaan Obat-Obatan Lainnya Berupa Obat-Obatan Dukungan Layanan Kesehatan Bergerak Bakti Kesehatan Bermartabat (BKB).</p> <p>16. Pengadaan Obat-Obatan Lainnya Berupa Obat-Obatan Dukungan Layanan Kesehatan Bergerak Bakti Kesehatan Bermartabat (BKB).</p>
Realisasi Fisik	38,2%
Kendala/Hambatan Ketercapaian	
Kesimpulan	Masih ada Pagu Anggaran yang belum terealisasi sebesar 13%



4.2.2.3. Program Prioritas Peningkatan Kesempatan Kerja dan Berusaha Melalui Penyediaan Lapangan Pekerjaan

Bidang : Pekerjaan	Aspek : Peningkatan Lapangan Pekerjaan
OPD	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral
Pagu anggaran tahun 2023	Rp 873.579.000
Realisasi Keuangan (Rp)	Rp 873.579.000
Realisasi Keuangan (%)	100%

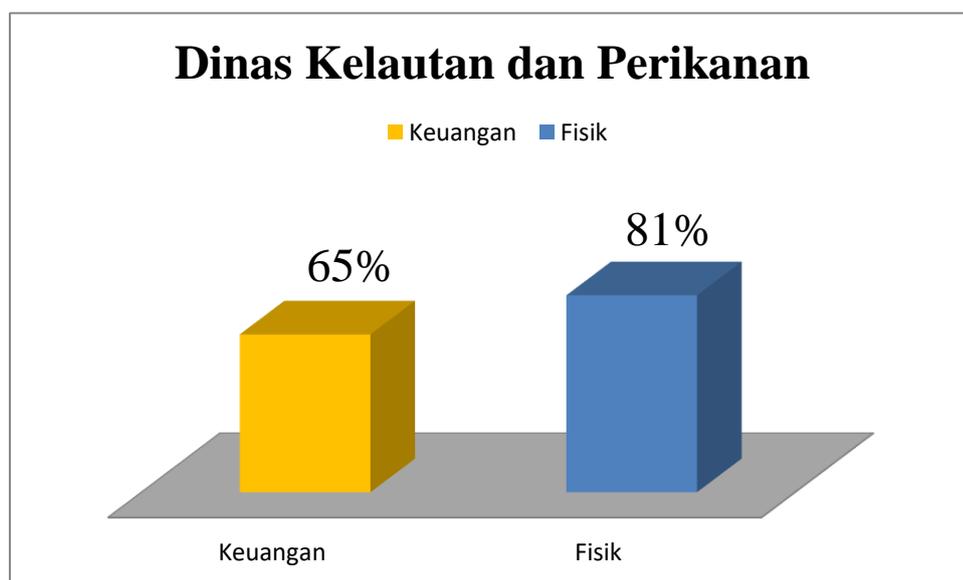
Program	Peningkatan Kesempatan Kerja dan Berusaha Melalui Penyediaan Lapangan Pekerjaan Kegiatan: 1. Pengadaan Mesin dan Peralatan Pendukung Pelatihan Tataboga dan fashionDBHCHT TA. 2023 pada Dinas Perindag ESDM. 2. Pengadaan Mesin Air Masak Al-Miza dan Peralatan Pendukung Pelatihan Penumbuhan Ekonomi di Sektor Industri Kecil Menengah (IKM) di Kab LabuhanBatu Utara TA. 2023 pada DPPESDM Provsu
Realisasi Fisik	100%
Kendala/Hambatan Ketercapaian	
Kesimpulan	Sudah terealisasi



4.2.2.4. Program Prioritas Peningkatan Daya Saing Melalui Sektor Agraris

Bidang : Sektor Agraris	Aspek : Daya Saing Melalui Sektor Agraris
OPD	Dinas Kelautan dan Perikanan
Pagu anggaran tahun 2023	Rp 3.652.851.060
Realisasi Keuangan (Rp)	Rp. 2,374,076,060.00,-
Realisasi Keuangan (%)	65.0%
Program	Peningkatan Daya Saing Melalui Sektor Agraris Kegiatan: 1. Bantuan Premi Asuransi Nelayan. 2. Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan di Kab.

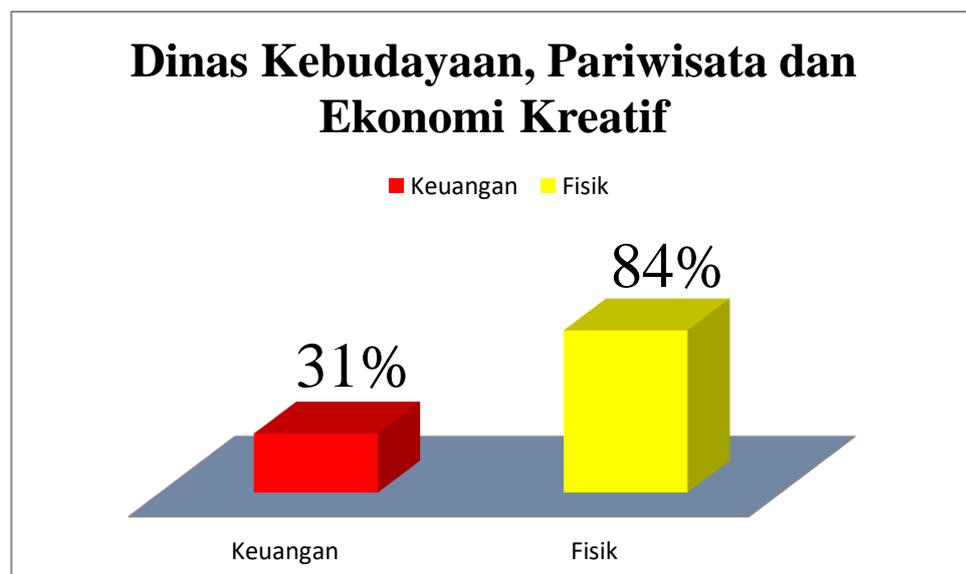
	<p>Dairi.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan Di Kab. Samosir. 4. Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar - Pengadaan Mesin Inboard 28 PK. 5. Pengadaan Alat Penangkapan Ikan. 6. Pengadaan sampan bermotor beserta alat penangkapan ikan untuk nelayan PUD. 7. Belanja Bibit Ikan dalam rangka pengembangan usaha budidaya ikan gurame di Kabupaten Batubara. 8. Belanja bibit ikan dalam rangka pengembangan usaha budidaya ikan Lele di Kab. Batubara. 9. Belanja bibit ikan dalam rangka pengembangan usaha budidaya ikan Kerapu di Kab. Batubara.
Realisasi Fisik	81,1%
Kendala/Hambatan Ketercapaian	
Kesimpulan	Masih terdapat Pagu Anggaran yang belum terealisasi sebesar 16%



4.2.2.5. Program Prioritas Peningkatan Daya Saing Melalui Sektor Pariwisata

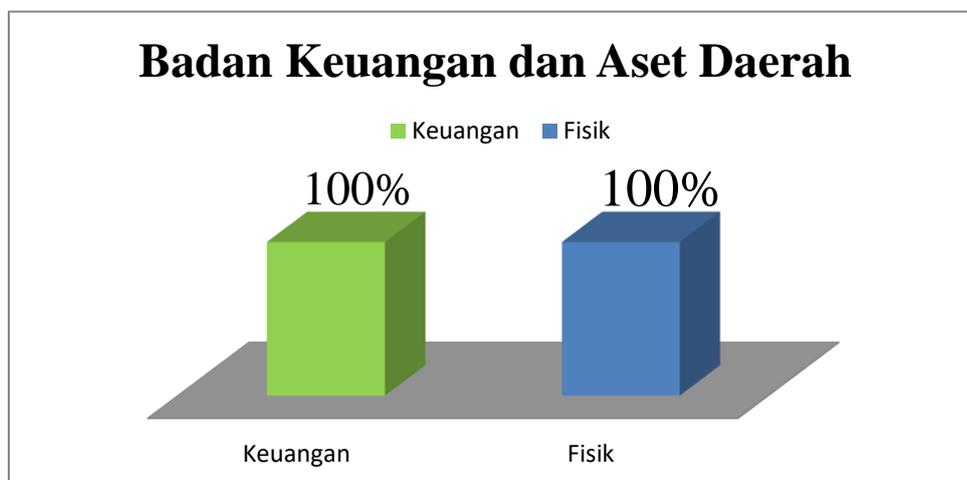
Bidang : Sektor Pariwisata	Aspek : Daya Saing Melalui Sektor Pariwisata
OPD	Dinas Kebudayaan,Parawisata dan Ekonomi Kreatif
Pagu anggaran tahun 2023	Rp. 9.017.232.002
Realisasi Keuangan (Rp)	Rp. 2,760,992,751.00
Realisasi Keuangan (%)	30.6%
Program	<p>Peningkatan Daya Saing Melalui Sektor Pariwisata</p> <p>Kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembayaran Uang Muka 30% Atas Kegiatan Penataan Sarana Danprasarana Serta Fasilitas Umum Pariwisata Di Destinasi Parawisatasumut Bukit Lawang, Bahorok, Kabupaten Langkat. 2. Pembayaran Uang Muka 30% Atas Pekerjaan Penataan Sarana Dan Prasarana Serta Fasilitas Umum Pariwisata Di Destinasi Pariwisata Sumut Tangkahan, Batang Serangan, Kabupaten Langkat. 3. Uang Muka (30%) Revitalisasi Dan Penyediaan Sarana Prasarana Situs Mesjid Azizi Tanjung Pura, Kabupaten Langkat. 4. Pembayaran Uang Muka (30%) Atas Pekerjaan Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor - Penataan Situs Benteng Putri Hijau T.A.2023. 5. Pembayaran Uang Muka (30%) Atas Penataan Komplek Situs Bagasgodang Ulu Pungkut, Kab.Madina. 6. Belanja Modal Tanaman Penataan Situs Benteng Putri Hijau T.A. 2023. 7. Belanja Pendukung Kegiatan Sosialisasi Edukasi Interaktif Terhadap Siswa Sekolah Di Kawasan Toba Caldera Uggp Ta.2023. 8. Belanja Pendukung Kegiatan Sosialisasi Mitigasi Bencana Alam Dan Perubahan Iklim Di Kspn Danau Toba T.A.2023. 9. Belanja Pendukung Kegiatan Pelatihan Pemandu Wisata Di Geositetoba Caldera Uggp. 10. Sosialisasi Digitalisasi Pemasaran Pariwisata. 11. Pelaksanaan Sosialisasi Digitalisasi Pemasaran Di Kabupaten Simalungun (Belanja Eo). 12. Pengadaan Bahan Kegiatan Digitalisasi Promosi Pariwisata (Brosurdan Papan Nama). 13. Partisipasi Pelaksanaan Event Pariwisata Dalam Dan Luar Negeri -Sewa Stand Pada Pameran Inacraft.

	<p>14. Pembuatan Pengembangan Aplikasi Digitalisasi Promosi Pariwisata.</p> <p>15. Belanja Modal Peralatan Jaringan - Pembuatan Website Digitalisasi Promosi Pariwisata.</p> <p>16. Pelaksanaan Sosialisasi Digitalisasi Pemasaran Di Kabupaten Tapanuli Selatan.</p> <p>17. Pelaksanaan Sosialisasi Digitalisasi Pemasaran Di Kabupaten Nias Utara.</p> <p>18. Pengadaan Alat Digitalisasi Promosi Pariwisata (Digital Signage).</p> <p>19. Pelaksanaan Sosialisasi Digitalisasi Pemasaran Di Kabupaten Batu Bara (Belanja Eo).</p> <p>20. Sewa Tempat Pemasangan Iklan Pariwisata (Videotron).</p> <p>21. Belanja Event Organizer Rakor Pemasaran Dan Promosi Pariwisata.</p> <p>22. Penyediaan Akomodasi Dan Makan Minum Rakor Pemasaran Dan Promosi Pariwisata.</p>
Realisasi Fisik	84.1%
Kendala/Hambatan Ketercapaian	
Kesimpulan	Masih terdapat Pagu Anggaran yang belum terealisasi sebesar 54%



4.2.2.6. Program Prioritas Peningkatan Kualitas Reformasi Birokrasi

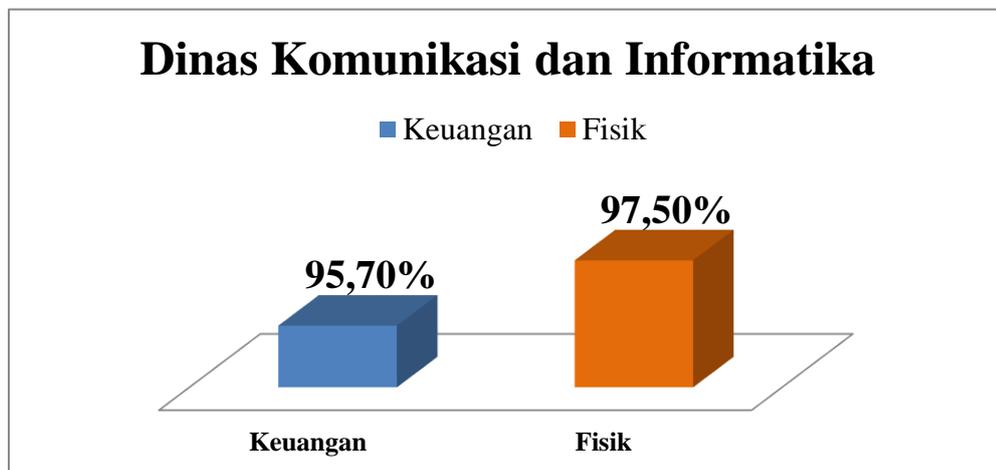
Bidang : Birokrasi	Aspek : Kualitas Reformasi Birokrasi
OPD	Badan Keuangan dan Aset Daerah
Pagu anggaran tahun 2023	Rp 425.698.000
Realisasi Keuangan (Rp)	Rp. 425.698.000
Realisasi Keuangan (%)	100%
Program	Peningkatan Kualitas Reformasi Birokrasi
	<p>Kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD. 2. Kegiatan Penginputan Form Praktik Baik Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pada Perangkat Daerah. 3. Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi. 4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) . 5. Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan - Sosialisasi Evaluasi SAKIP Pemerintah Provinsi Sumatera Utara
Realisasi Fisik	100%
Kendala/Hambatan Ketercapaian	
Kesimpulan	Pagu Anggaran sudah terealisasi.



4.2.2.7. Program Prioritas Peningkatan Sosial Kemasyarakatan dan Olahraga

Bidang : Kemasyarakatan dan Olah Raga	Aspek : Peningkatan
OPD	Dinas Komunikasi dan Informatika
Pagu anggaran tahun 2023	Rp 4,218,433,083,209
Realisasi Keuangan (Rp)	Rp. 85,559,013,051
Realisasi Keuangan (%)	95.7%
Program	<p>Peningkatan Sosial Kemasyarakatan dan Olahraga</p> <p>Kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Biaya Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan Internet Lisensi Aplikasi untuk bulan Januari - Juni 2023. 2. Konsultan Perencana Pembangunan Akses Jalan Menuju Proyek Stadion untuk kebutuhan PON XXI 2024 Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa- Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi\ Kosultansi Perencanaan Pembangunan Akses Jalan. 3. Pembangunan Akses Jalan Menuju Proyek Stadion untuk kebutuhan PON XXI2024 1 Paket Jalan Lingkungan Beton 2,5 M. 4. Fasilitasi Pembinaan Mental dan Spiritual. 5. Fasilitasi Pembinaan Mental dan Spiritual. 6. Fasilitasi Pembinaan Mental dan Spiritual. 7. Fasilitasi Pembinaan Mental dan Spiritual. 8. Fasilitasi Pembinaan Mental dan Spiritual. 9. Fasilitasi Pembinaan Mental dan Spiritual. 10. Fasilitasi Pembinaan Mental dan Spiritual. 11. Fasilitasi Pembinaan Mental dan Spiritual. 12. Fasilitasi Pembinaan Mental dan Spiritual. 13. Fasilitasi Pembinaan Mental dan Spiritual. 14. Fasilitasi Pembinaan Mental dan Spiritual. 15. Fasilitasi Pembinaan Mental dan Spiritual. 16. Fasilitasi Pembinaan Mental dan Spiritual. 17. Fasilitasi Pembinaan Mental dan Spiritual. 18. Fasilitasi Pembinaan Mental dan Spiritual. 19. Fasilitasi Pembinaan Mental dan Spiritual. 20. Fasilitasi Pelayanan Dasar 21. Fasilitasi Pembinaan Mental dan Spiritual. 22. Fasilitasi Pembinaan Mental dan Spiritual. 23. Fasilitasi Pembinaan Mental dan Spiritual. 24. Fasilitasi Pembinaan Mental dan Spiritual. 25. Fasilitasi Pelayanan Dasar 26. Fasilitasi Pembinaan Mental dan Spiritual.

	27. Fasilitasi Pembinaan Mental dan Spiritual. 28. Fasilitasi Pembinaan Mental dan Spiritual. 29. Fasilitasi Pembinaan Mental dan Spiritual. 30. Fasilitasi Pembinaan Mental dan Spiritual. 31. Fasilitasi Pembinaan Mental dan Spiritual. 32. Fasilitasi Pembinaan Mental dan Spiritual. 33. Fasilitasi Pembinaan Mental dan Spiritual. 34. Fasilitasi Pembinaan Mental dan Spiritual.
Realisasi Fisik	97.5%
Kendala/Hambatan Ketercapaian	
Kesimpulan	Masih terdapat Pagu Anggaran yang belum terealisasi sebesar 0.04%



4.2.2.8. Program Prioritas Pembangunan Infrastruktur Yang Baik Dan Berwawasan Lingkungan

Bidang : Pembangunan	Aspek : Pembangunan Infrastruktur Lingkungan
OPD	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Pagu anggaran tahun 2023	Rp. 2,010,772,390,123
Realisasi Keuangan (Rp)	Rp. 392,485,876,110
Realisasi Keuangan (%)	19.5%
Program	Pembangunan Infrastruktur Yang Baik Dan Berwawasan Lingkungan
	Kegiatan: 1. Pembangunan Jalan dan Jembatan Provinsi untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi Sumatera Utara. 2. PHJD Ruas Jalan Sp, Situnggaling - Tongging - Bts,

	<p>Dairi di Kab, Karo</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. PHJD Ruas Jalan Sp, Lae Pandom - Sialahi - Bts, Karo di Kab, Dairi. 4. PHJD Ruas Jalan Bakkara - Janji Raja di Kab, Humbang Hasundutan. 5. Penanganan Long Segment (Pemeliharaan Rutin, Pemeliharaan Berkala, Peningkatan/Rekonstruksi) pada Ruas Balige - Tara Bunga- Meat (Batas Taput) di Kab, Toba (DAK). 6. Penanganan Long Segment (Pemeliharaan Rutin, Pemeliharaan Berkala, Peningkatan/Rekonstruksi) pada Ruas Siborongborong - Sipahutar di Kab, Tapanuli Utara (DAK). 7. Pembangunan Saluran Drainase pada ruas jalan Aek Nabara Tonga - Sibuhuan di Kab, Padang Lawas. 8. Pembangunan Tembok Penahan pada Ruas Jalan Aek Nabara Tonga - Sibuhuan di Kab, Padang Lawas. 9. Pembangunan Tembok Penahan pada Ruas Jalan Binanga - Aek Nabara Tonga di Kab, Padang Lawas. 10. Pembangunan Tembok Penahan pada Ruas Jalan Paringgonan - Sibuhuan di Kab, Padang Lawas. 11. Pembangunan Tembok Penahan pada Ruas Jalan Sihaporas - Paringgonan di Kab, Padang Lawas. 12. Penanganan Long Segment (Pemeliharaan Rutin, Pemeliharaan Berkala, Peningkatan/Rekonstruksi) pada Ruas Lahewa - Afulu (DAK). 13. Pembayaran Uang Muka 50% Pembangunan PLTS Pompa Air Mendukung Program Terintegrasi Peningkatan Produktivitas Pertanian Sumut 5. 14. Pembayaran Lunas (100%) Pembangunan PLTS Pompa Air Mendukung Program Terintegrasi Peningkatan Produktivitas Pertanian Sumut 5. 15. Pembayaran Uang Muka 50% Pembangunan PLTS Pompa Air Mendukung Program Terintegrasi Peningkatan Produktivitas Pertanian Sumut 6 pada Dinas Perindag ESDM Provsu. 16. Pembayaran Uang Muka 50% Pembangunan PLTS Pompa Air Mendukung Program Terintegrasi Peningkatan Produktivitas Pertanian Sumut 7 pada Dinas Perindag ESDM Provsu. 17. Konsultan Supervisi Peningkatan Jaringan Irigasi pada DI Mombang Boru (Pendukung DAK) Konsultan Supervisi. 18. Konsultan Supervisi Peningkatan Jaringan Irigasi pada DI Panombean/Panei Tongah/Bah Kata (Pendukung DAK) Konsultan Supervisi.
--	---

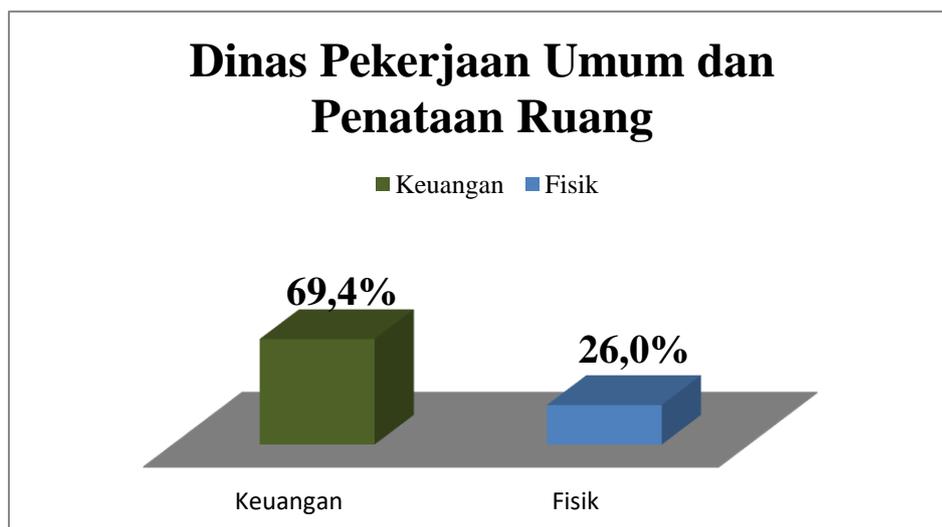
	<ol style="list-style-type: none"> 19. Konsultan Supervisi Peningkatan Jaringan Irigasi pada DI Simodong (Pendukung DAK) Konsultan Supervisi. 20. Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan D,I, Medan Krio Kec, Sunggal, Kab, Deli Serdang - Peningkatan Saluran Sekunder Sepanjang 400 m. 21. Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan D,I, Namo Rambe, Kec, Namo Rambe, Kab, Deli Serdang - Peningkatan Saluran Sekunder Sepj, 120 m. 22. Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa D,I,R, Percut, Kec, Percut Sei Tuan, Kab, Deli Serdang - Peninggian Tanggul Pada Paluh 80 Sepanjang 400m. 23. Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa D,I,R, Sisir Gunting, Kec, Hamparan Perak, Kab, Deli Serdang - Peninggian Saluran Paluh Babi, Paluh Kurau Sepj, 3500m; Normalisasi Saluran Pembangunan Sepj, 4000m. 24. Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan D,I, Bah Tonang Kec, Sipispis, Kab, Serdang Bedagai [-] Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan pada Daerah Irigasi Bah Tonang, Kec, Sipispis, Kab, Serdang Bedagai, Rehab, Saluran Sekunder Sepj, 410m. 25. Pembayaran Lunas 100% Pembangunan PLTS Pompa Air mendukung Program Terintegrasi Peningkatan Produktivitas Pertanian Sumut 7 pada DPPESDM Provsu TA, 2023. 26. Pembayaran Lunas 100% Pembangunan PLTS Pompa Air mendukung Program Terintegrasi Peningkatan Produktivitas Pertanian Sumut 6 pada DPPESDM Provsu TA, 2023. 27. Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan D,I, Pekan Dolok, Kec, Dolok Masihul, Kab, Sergei [-] Peningkatan Jaringan Irigasi D,I, Pekan Dolok; Pembuatan Pasangan Saluran Primer 800m; Pembuatan Pasangan Saluran Sekunder 600m; dan Perbaikan Pintu Banguna. 28. Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan D,I, Panombean/P, Tongah/Bah Kata, Kec, Panombean Panei, Kab, Simalungun (DAK). 29. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan pada Daerah Irigasi Parit Lompaten 1,242 Ha (Saluran Sekunder Sukababo) [-] Konsultan Pengawasan (DAU) - Daerah Irigasi Parit Lompaten 1,242 Ha Kecamatan Juhar Kabupaten Karo (3,059419 - 98,324123). 30. Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan D,I, Simodong, Kec, Sei Suka, Kab, Batu Bara [-]
--	---

	<p>Pembuatan Pasangan Saluran Sekunder Sepj, 3,500 m; Perbaiki Bangunan Bagi 1 Buah; Perbaiki Pintu Bangunan Bagi 17 Bh (DAK).</p> <p>31. Normalisasi Saluran D,I Cinta Maju/ Damai [-] Normalisasi Saluran D,I Cinta Maju/ Damai Sepj, 2,000 M.</p> <p>32. Normalisasi Saluran D,I Serbangan [-] Normalisasi Saluran D,I Serbangan Sepj, 2,000 M.</p> <p>33. Normalisasi Saluran D,I Tanjung Muda [-] Normalisasi Saluran D,I Tanjung Muda Sepj, 2,000 M.</p> <p>34. Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi pada D,I PANCA ARGA Kec, Rawang Panca Arga Kab, Asahan; [-] Normalisasi Saluran Pembuang.</p> <p>35. Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi pada D,I SERBANGAN Kec, Rawang Panca Arga Kab, Asahan [-] Normalisasi Saluran Pembuang.</p> <p>36. Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi pada D,I SIJAMBI Kec, Simpang Empat Kab,Asahan; [-] Normalisasi Saluran Pembuang.</p> <p>37. Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi pada D,I SUKA MAKMUR Kec, Pulo Bandring Kab,Asahan; [-] Normalisasi Saluran Sekunder.</p> <p>38. Pemeliharaan Sayap Bendung D,I Purwodadi (DAU).</p> <p>39. Pemeliharaan Sayap Bendung D,I Tanjung Muda (DAU).</p> <p>40. Pemeliharaan Berkala pada DIR, Cinta Makmur Desa Selat Besar, Kec, Bilah Hilir Kab, Labuhanbatu - Normalisasi Saluran Pembuang Saluran Selat Tengah 2000 m.</p> <p>41. Pemeliharaan Berkala pada DIR, Cinta Makmur Desa Tanjung Serang Elang, Kec, Panai Hulu Kab, Labuhanbatu - Normalisasi Saluran Pembuang Saluran Abadi 2000 m.</p> <p>42. Pemeliharaan Berkala pada DIR, Sei Rakyat/Sei Serdang Desa Bagan Bilah, Kec, Panai Tengah Kab, Labuhanbatu - Normalisasi Saluran Pembuang Saluran Sei Cina II sepj, 2000 m.</p> <p>43. Pemeliharaan Berkala pada DIR, Sei Rakyat/Sei Serdang Desa Sei Rakyat, Kec, Panai Tengah Kab, Labuhanbatu - Normalisasi Saluran Pembuang Saluran Sei Cina I sepj 2000 m.</p> <p>44. Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi pada DI, Hutapaung/Parmiahah Kec, Pollung Kab,Humbang Hasundutan - Perbaiki Saluran Sepj, 110 m.</p> <p>45. Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi pada DI,</p>
--	---

	<p>Lobu Tua Kec, Lintong Nihuta Kab,Humbang Hasundutan - Perbaikan Saluran Sepj, 77 m - Perbaikan bangunan sadap 1 bh - Normalisasi Saluran sepj, 1000 m.</p> <p>46. Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan D,I, Mombang Boru, Kec, Sibabangun, Kab, Tapteng Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan D,I, Mombang Boru, Kec, Sibabangun, Kab, Tapteng (DAK) '- Saluran Primer Sepj, 150 m' '- Saluran Sekunder Sepj, 1,170 m.</p> <p>47. Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi pada DI, Hasak I dan II Kec, Tarutung Kab,Tapanuli Utara - Perbaikan Saluran Sepj, 64 m.</p> <p>48. Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi pada DI, Sidilanitano Kiri-Kanan Paket II Kec,Siborong-borong Kab,Tapanuli Utara [-] Pemeliharaan Tanggul Saluran.</p> <p>49. Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi pada DI, Sidilanitano Kiri-Kanan Paket I Kec,Siborong-borong Kab,Tapanuli Utara [-] Perbaikan Saluran Sepj, 45 m , Normalisasi Saluran Sepj, 1,000 m.</p> <p>50. Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Pada DI, Simangatasi II Kec, Silaen Kab, Toba - Perbaikan Saluran Sepj, 83 m.</p> <p>51. Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi pada DI, Simok-mok Kec, Siborong-borong Kab,Tapanuli Utara - Perbaikan Saluran Sepj, 74 m - Tanggul Saluran Sepj, 7 m - Perbaikan Pintu 1 bh.</p> <p>52. Konsultan Manajemen Konstruksi (MK), Supervisi dan Pengawasan (DAK).</p> <p>53. Pembangunan Transmisi Air Curah Untuk SPAM Regional Mebidang; Pengembangan Jaringan Distribusi Utama (JDU) Helvetia (Kec, Helvetia, Sunggal) Jaringan Perpipaan Sepanjang 6,906 m (375 l/det) (DAK).</p> <p>54. Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Pengembangan Infrastruktur SPAM Kawasan Permukiman di Kec, Tanah Jawa Kab, Simalungun; Terbangunnya 1 (satu) sistem jaringan air minum sep, 3000m.</p> <p>55. Pengembangan Infrastruktur SPAM Kawasan Permukiman di Kec, Tanah Jawa Kab, Simalungun; Terbangunnya 1 (satu) sistem jaringan air minum sep, 3000m, konsultan perencanaan teknis (DED, Amdal, SID).</p> <p>56. Pembangunan SPAM Kawasan MBR di Kec,</p>
--	---

	<p>Hutaimbaru Kota Padang Sidempuan.</p> <p>57. Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Kawasan Wisata Religi Babussalam Desa Besilam Kabupaten Langkat.</p> <p>58. Pekerjaan Penataan Kawasan Wisata Religi Babussalam Desa Besilam Terintegrasi.</p> <p>59. Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (lima belas) Ha di Sei Bilah Kab, Langkat A.</p> <p>60. Pembayaran Uang Muka 50% untuk Pekerjaan Belanja Hibah Pemasangan Sambungan Listrik baru bagi Rumah Tangga tidak mampu di Wilayah Kerja Wilayah I.</p> <p>61. Pembayaran Uang Muka 50% untuk Pekerjaan Belanja Hibah Pemasangan Sambungan Listrik baru bagi Rumah Tangga tidak mampu di Wilayah Kerja Wilayah V.</p> <p>62. Pembayaran Uang Muka 50% untuk Pekerjaan Belanja Hibah Pemasangan Sambungan Listrik baru bagi Rumah Tangga tidak mampu di Wilayah Kerja Wilayah III.</p> <p>63. Pembayaran Uang Muka 30% untuk Pekerjaan Pemasangan Sambungan Listrik baru bagi Rumah Tangga tidak mampu di Wilayah Kerja Wilayah VI DPPESDM Provsu.</p> <p>64. Pembayaran Uang Muka 30% untuk Pekerjaan Pemasangan Sambungan Listrik baru bagi Rumah Tangga tidak mampu di Wilayah Kerja Wilayah VII DPPESDM Provsu.</p> <p>65. Pembayaran Uang Muka 30% untuk Pekerjaan Pemasangan Sambungan Listrik baru bagi Rumah Tangga tidak mampu di Wilayah Kerja Wilayah II DPPESDM Provsu.</p> <p>66. Pembayaran Pelunasan (100%) Pemasangan SAmbungan LIstrik baru bagi RTS di Wilayah Kerja Wilayah I pada DPPESDM Provsu TA, 2023.</p> <p>67. Pembayaran Lunas (100%) Pemasangan Sambungan Listrik baru bagi Rumah Tangga tidak mampu di Wilayah Kerja Wilayah III pada DPPESDM Provsu TA, 2023.</p> <p>68. Pembayaran Lunas di kurangi Uang Muka dari Nilai Kontrak pekerjaan Pemasangan Sambungan Listrik baru bagi Rumah tangga Tidak mampu di Wilayah Kerja Wilayah II pada DPPESDM Provsu TA, 2023.</p> <p>69. Pembayaran Lunas di kurangi Uang Muka dari Nilai</p>
--	---

	<p>Kontrak pekerjaan Pemsangan Sambungan Listrik baru bagi Rumah tangga Tidak mampu di Wilayah Kerja Wilayah VII pada DPPESDM Provsu TA, 2023.</p> <p>70. Pembayaran Lunas di kurangi Uang Muka dari Nilai Kontrak pekerjaan Pemsangan Sambungan Listrik baru bagi Rumah tangga Tidak mampu di Wilayah Kerja Wilayah VI pada DPPESDM Provsu TA, 2023.</p> <p>71. Pembayaran Lunas di kurangi Uang Muka dari Nilai Kontrak pekerjaan Pemsangan Sambungan Listrik baru bagi Rumah tangga Tidak mampu di Wilayah Kerja Wilayah IV pada DPPESDM Provsu TA, 2023.</p> <p>72. Penataan Alun-Alun Kota Pematang Siantar Taman Alun-Alun.</p> <p>73. Pembangunan Baru Non Standar Gedung Negara Klasifikasi Tidak Sederhana - Rumah Sakit Haji.</p> <p>74. Pemeliharaan Berkala pada DIR. Cinta Makmur Desa Selat Besar, Kec. Bilah Hilir Kab. Labuhanbatu - Normalisasi Saluran Pembuang Saluran Karang Anyar Sepj. 2000 m.</p>
Realisasi Fisik	69.4%
Kendala/Hambatan Ketercapaian	
Kesimpulan	Masih terdapat Pagu Anggaran yang belum terealisasi sebesar 49.9%



4.3. Persentase Ketercapaian Program Prioritas

4.3.1. Capaian Semester 1 (Juli 2023)

No	Program Kegiatan Prioritas	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan(%)	Realisasi Fisik(%)
1	Program Prioritas Peningkatan Daya Saing Melalui Sektor Pariwisata	9.017.232.002	2.218.390.037	24.6%	80%
2	Program Prioritas Peningkatan Kualitas Reformasi Birokrasi	63.250.000	0	0	100%
3	Program Prioritas Peningkatan Sosial Kemasyarakatan Dan Olah Raga Dan Prioritas Pembangunan Infrastruktur Yang Baik Dan Berwawasan Lingkungan	1.818.510.862.710	95.698.555.853	5,26%	20,99%
4	Program Prioritas peningkatan derajat kesehatan masyarakat	9.771.848.000	0	0	42,86%
Hasil Capaian Semester 1 pada Bulan Juli		20670840864	97916945890	24.60%	180.0%

4.3.2. Capaian Program Prioritas Semester ke II (s.d September 2023)

No	Delapan Program Prioritas	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan(%)	Realisasi Fisik(%)
1	Program Prioritas Pembangunan Peningkatan dan Pemenuhan Akses Pendidikan	870.990.480	814.204.340	93%	100%
2	Program Prioritas Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	16.586.553.829	8.508.966.900	51%	38.2%
3	Program Prioritas Peningkatan Kesempatan Kerja Dan Berusaha Melalui Penyediaan Lapangan Pekerjaan	873.579.000	873.579.000	100%	100%
4	Program Prioritas Peningkatan Daya Saing Melalui Sektor Agraris	3.652.851.060	2.374.076.060	65.0%	81.1%
5	Program Prioritas Peningkatan Daya Saing Melalui Sektor Pariwisata	9.017.232.002	2,760,992,751	30.6%	84.1%

6	Progam Prioritas Peningkatan Kualitas Reformasi Birokrasi.	425.698.000	425.698.000	100%	100%
7	Progam Prioritas Peningkatan Sosial Kemasyarakatan dan Olahraga	4,218,433,083,209	85,559,013,051	95.7%	97.5%
8	Progam Prioritas Pembangunan Infrastruktur Yang Baik dan Berwawasan Lingkungan	2,010,772,390,123	392,485,876,110	26%	69.4%
Hasil Capaian Delapan Program Prioritas Bulan September		6,260,632,377,703	493,802,406,212	561.30%	670.30%

4.3.3. Ketercapaian Program Prioritas Juli - September Sektor Realisasi Keuangan

No	Program Prioritas	Ketercapaian	
		Juli	September
1	Program Prioritas Pembangunan Peningkatan dan Pemenuhan Akses Pendidikan	0%	93%
2	Program Prioritas Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	0%	51%
3	Progam Prioritas Peningkatan Kesempatan Kerja Dan Berusaha Melalui Penyediaan Lapangan Pekerjaan	0%	100%
4	Progam Prioritas Peningkatan Daya Saing Melalui Sektor Agraris	0%	65.0%
5	Progam Prioritas Peningkatan Daya Saing Melalui Sektor Pariwisata	24.6%	30.6%
6	Progam Prioritas Peningkatan Kualitas Reformasi Birokrasi.	0%	100%
7	Progam Prioritas Peningkatan Sosial Kemasyarakatan dan Olahraga	5.26%	95.7%
8	Progam Prioritas Pembangunan Infrastruktur Yang Baik dan Berwawasan Lingkungan	0%	26%
RATA-RATA		29.86%	561.30%

4.3.4. Ketercapaian Program Prioritas Juli sampai September Sektor Realisasi Fisik

No	Program Prioritas	Ketercapaian	
		Juli	September
1	Program Prioritas Pembangunan Peningkatan dan Pemenuhan Akses Pendidikan	0%	100%
2	Program Prioritas Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	0%	38.2%
3	Program Prioritas Peningkatan Kesempatan Kerja Dan Berusaha Melalui Penyediaan Lapangan Pekerjaan	42.86%	100%
4	Program Prioritas Peningkatan Daya Saing Melalui Sektor Agraris	0%	81.1%
5	Program Prioritas Peningkatan Daya Saing Melalui Sektor Pariwisata	80%	84.1%
6	Program Prioritas Peningkatan Kualitas Reformasi Birokrasi.	100%	100%
7	Program Prioritas Peningkatan Sosial Kemasyarakatan dan Olahraga	20.99%	97.5%
8	Program Prioritas Pembangunan Infrastruktur Yang Baik dan Berwawasan Lingkungan	0%	69.4%
RATA-RATA		243.85%	670.30%

4.4. Matriks 54 Kegiatan Strategis Daerah Pada Pencapaian 8 Program Prioritas Pembangunan Sumatera Utara Juni – September 2023

No	54 (Lima Puluh Empat) Kegiatan Strategis Daerah Pada Pencapaian 8 (Delapan) Program Prioritas Pembangunan Sumatera Utara Juni – September 2023	OPD Terkait Pembangunan Daerah	Jumlah Kegiatan Strategis di OPD Terkait	Jenis Program Prioritas Pembangunan Sumatera Utara	Jumlah	
					8 (Delapan) Program Prioritas	Tidak Program Prioritas
1	Pembangunan unit sekolah baru menengah, kejuruan dan khusus sebanyak 26 (dua puluh enam) unit dalam rangka memenuhi akses pemerataan layanan pendidikan.	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH PROVSU	11	Tidak Program Prioritas	3	8
2	Pemberian Bantuan Operasional Pendidikan (BOP)					

	untuk siswa/i jenjang SMA, SMK, dan SLB Negeri dengan prioritas intervensi kepada siswa/i kurang mampu sejumlah 167.000 (seratus enam puluh tujuh ribu) jiwa.				
3	Pembangunan kampung beasiswa scholarships booth sebagai wadah informasi beasiswa S1, S2, S3 di Pekan Raya Sumatera Utara Medan.				
4	Kerjasama link and match Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/vokasi dengan dunia usaha dunia industry.				
5	Penyelarasan kurikulum vokasi/SMK dengan jumlah sebanyak 70 (tujuh puluh) kompetensi keahlian vokasi.				
6	Teaching factory atau pembelajaran berbasis produk dan bisnis dengan jumlah sebanyak 70 (tujuh puluh) kompetensi keahlian vokasi.				
7	MoU dan MoA yang ditandatangani melalui kerjasama link and match antara SMK dan dunia usaha dan dunia industri dengan jumlah sebanyak 210 (dua ratus sepuluh) MoU/MoA kerjasama.				
8	Pembangunan 33 (ga puluh ga) unit pojok baca dan gerobak baca serta pengembangan perpustakaan digital (e- library).				Program Prioritas Pembangunan Peningkatan dan Pemenuhan Akses Pendidikan
9	Gubernur/Wakil Gubernur Sumatera Utara menyapa melalui kelas movasi bagi siswa/i Sekolah Menengah Atas dan Kejuruan se- Sumatera Utara.				Tidak Program Prioritas
10	Penguatan materi kearifan lokal serta penyelarasan kecerdasan spiritual, emosional dan intelektual dalam kurikulum melalui pola integrasi ilmu.	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			Program Prioritas Peningkatan Sosial Kemasyarakatan dan Olahraga
11	Penguatan pembelajaran jarak jauh (distance learning) melalui metode Training of Trainer (ToT) pada tenaga pendidik dari 33 (ga puluh ga)	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH PROVSU			Program Prioritas Pembangunan Peningkatan dan

	Kabupaten/Kota.			Pemenuhan Akses Pendidikan		
No	54 (Lima Puluh Empat) Kegiatan Strategis Daerah Pada Pencapaian 8 (Delapan) Program Prioritas Pembangunan Sumatera Utara	OPD Terkait Pembangunan Daerah	Jumlah Kegiatan Strategis di OPD Terkait	Jenis Program Prioritas Pembangunan Sumatera Utara	Jumlah	
					8 (Delapan) Program Prioritas	Tidak Program Prioritas
12	Penanganan covid-19 melalui penguatan pola 3T (testing, tracing, treatment), percepatan vaksinasi, penyediaan obat – obatan, penguatan kapasitas rumah sakit dan pemberian insentif bagi tenaga medis	DINAS KESEHATAN MASYARAKAT	7	Program Prioritas Pembangunan Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	4	3
13	Pembangunan dan rehabilitasi Rumah Sakit Haji Medan dalam rangka peningkatan layanan kesehatan masyarakat	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		Program Prioritas Pembangunan Infrastruktur Yang Baik Dan Berwawasan Lingkungan		
14	Pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil Kurang Energi Kronis (KEK), balita kurus dan anak sekolah sebanyak 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa dalam rangka penurunan <i>prevalensi stun_ng</i>	DINAS KESEHATAN MASYARAKAT		Tidak Program Prioritas		
15	Peningkatan kapasitas layanan kesehatan melalui penambahan 100 (seratus) bed dalam rangka rehabilitasi narkoba pada Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. M. Ildrem					
16	Kampanye Gerakan Masyarakat Sehat (GERMAS) melalui peningkatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) pada masyarakat di 33 (tiga puluh tiga) Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara					
17	masyarakat kurang mampu sebanyak 420.000 (empat ratus dua puluh ribu) jiwa dan penyediaan kontribusi bagi peserta PBI JKN sebanyak 4.733.689 (empat juta					

	tujuh ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh sembilan) jiwa					
18	Layanan kesehatan bergerak melalui pengadaan 8 (delapan) unit mobil medis/bus kesehatan.	DINAS KESEHATAN MASYARAKAT				
No	54 (Lima Puluh Empat) Kegiatan Strategis Daerah Pada Pencapaian 8 (Delapan) Program Prioritas Pembangunan Sumatera Utara	OPD Terkait Pembangunan Daerah	Jumlah Kegiatan Strategis di OPD Terkait	Jenis Program Prioritas Pembangunan Sumatera Utara	Jumlah	
					8 (Delapan) Program Prioritas	Tidak Program Prioritas
19	Fasilitasi Kerja Sama 10 (Sepuluh) Sektor Ekonomi Dengan Dunia Usaha Dan Dunia Industri dalam Rangka Peningkatan Kompetensi dan Kesempatan Kerja.	DINAS PERINDUSTRIAN,PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	4	Program Prioritas peningkatan kesempatan kerja dan berusaha melalui penyediaan lapangan pekerjaan	2	2
20	Fasilitasi standarisasi 1000 (seribu) UMKM dan IKM menuju digitalisasi pemasaran.					
21	Pengembangan sistem informasi ketenagakerjaan terintegrasi melalui bursa kerja online.					
22	Penguatan kebijakan daerah dalam rangka optimalisasi investasi melalui peraturan daerah tentang pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal serta peraturan daerah tentang Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM).					
No	54 (Lima Puluh Empat) Kegiatan Strategis Daerah Pada Pencapaian 8 (Delapan) Program Prioritas Pembangunan Sumatera Utara	OPD Terkait Pembangunan Daerah	Jumlah Kegiatan Strategis di OPD Terkait	Jenis Program Prioritas Pembangunan Sumatera Utara	Jumlah	
					8 (Delapan) Program Prioritas	Tidak Program Prioritas
23	Peningkatan produksi daging sapi menjadi sebesar 17.149,75 ton dalam rangka pemenuhan kebutuhan konsumsi daging sapi.	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	5	Tidak Program Prioritas	1	4
24	Peningkatan produksi daging kambing/domba menjadi sebesar 1.537,50 ton dalam rangka pemenuhan kebutuhan konsumsi dan ekspor.					
25	Mempertahankan swasembada beras dan jagung					

	Kaldera Toba.					
32	Digitalisasi promosi pariwisata.					
33	Pelestarian budaya daerah melalui pemberdayaan Forum Kesultanan Daerah.					
No	54 (Lima Puluh Empat) Kegiatan Strategis Daerah Pada Pencapaian 8 (Delapan) Program Prioritas Pembangunan Sumatera Utara	OPD TERKAIT PEMBANGUNAN DAERAH	Jumlah Kegiatan Strategis di OPD Terkait	Jenis Program Prioritas Pembangunan Sumatera Utara	Jumlah	
					8 (Delapan) Program Prioritas	Tidak Program Prioritas
34	Mempertahankan pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap laporan keuangan pemerintah daerah provinsi dan dukungan pencapaian 80 (delapan puluh) persen opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada pemerintah kabupaten/kota sesumatera utara dalam peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di daerah (GWPP).	BADAN KEUANGANDAN ASET DAERAH	3	Program Prioritas Peningkatan Kualitas Reformasi Birokrasi	2	1
35	Peningkatan capaian nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dengan target predikat BB.	INSPEKTORAT		Tidak Program Prioritas		
36	Peningkatan Capaian Indeks Pelayanan Publik Dengan Target Predikat A.	BADAN KEUANGANDAN ASET DAERAH				
No	54 (Lima Puluh Empat) Kegiatan Strategis Daerah Pada Pencapaian 8 (Delapan) Program Prioritas Pembangunan Sumatera Utara	OPD TERKAIT PEMBANGUNAN DAERAH	Jumlah Kegiatan Strategis di OPD Terkait	Jenis Program Prioritas Pembangunan Sumatera Utara	Jumlah	
					8 (Delapan) Program Prioritas	Tidak Program Prioritas
37	Penguatan Pusat Wawasan Kebangsaan Dalam Rangka Peningkatan Kebebasan Berpendapat, Berserikat Dan Bebas Diskriminasi Di Provinsi Sumatera Utara	DINAS KEPEMUDAANDAN KEOLAHRAGAAN	10	Tidak Program Prioritas	2	8
38	Pembangunan 300 Kampung Bersinar (Bersih Narkoba)					
39	Channel layanan pengaduan masyarakat terkait Pembangunan Sumatera Utara.			DINAS KOMUNIKASIDAN INFORMATIKA		

40	Gubernur dan Wakil Gubernur mendengar melalui kegiatan dialog dengan masyarakat secara langsung maupun virtual;					
41	Pencapaian Standart Pelayanan Minimal (SPM) bidang sosial melalui peningkatan pelayanan panti yang menjadi kewenangan Provinsi Sumatera Utara.	DINAS KESEHATAN MASYARAKAT				
42	Peningkatan pembinaan atlet berprestasi dan tenaga keolahragaan serta peningkatan sarana prasarana olahraga dalam rangka pekan olahraga nasional tahun 2024	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			Program Prioritas Peningkatan Sosial Kemasyarakatan dan Olahraga	
43	Pemberian suplemen tambahan bagi atlet olahraga prestasi	DINAS KEPEMUDAANDAN KEOLAHRAGAAN			Tidak Program Prioritas	
44	Pembangunan Sports Centre di daerah Kualanamu					
45	Persiapan Tuan Rumah Pekan Olahraga Nasional XXI Tahun 2024					
46	Dukungan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Ibadah.	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT			Program Prioritas Peningkatan Sosial Kemasyarakatan dan Olahraga	
No	54 (Lima Puluh Empat) Kegiatan Strategis Daerah Pada Pencapaian 8 (Delapan) Program Prioritas Pembangunan Sumatera Utara	OPD TERKAIT PEMBANGUNAN DAERAH	Jumlah Kegiatan Strategis di OPD Terkait	Jenis Program Prioritas Pembangunan Sumatera Utara	Jumlah	
					8 (Delapan) Program Prioritas	Tidak Program Prioritas
47	Penanganan jalan strategis provinsi dalam kondisi baik yang meliputi jalan strategis kawasan wisata, kawasan pusat produktivitas, perkotaan dan kawasan daerah tertinggal sepanjang 218,22 (dua ratus delapan belas koma dua puluh dua) kilometer dan pencapaian tingkat kemantapan jalan provinsi sumatera utara sampai dengan 85 (delapan puluh lima) persen.	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	8	Program Prioritas Pembangunan Infrastruktur Yang Baik Dan Berwawasan Lingkungan	7	1
48	Fasilitasi penyelesaian masalah pertanahan dan tata ruang melalui penguatan, penegakan hukum dan kelembagaan.					
49	Optimalisasi jaringan irigasi sebesar lebih kurang					

	78.000 (enam puluh lima ribu) hektar yang merupakan kewenangan provinsi dalam rangka mempertahankan swasembada beras.				
50	Pembangunan dan pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Regional Mebidang.				
51	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Mebidang.				
52	Pembangunan role model pengurangan luas kawasan kumuh terintegrasi dan rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH) sebanyak 1000 (seribu) unit.	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
53	Penurunan emisi gas rumah kaca 35,55 (tiga puluh lima koma lima puluh lima) juta eq. Co2 (ekuivalensi karbondioksida) melalui kebijakan daerah tentang pembangunan rendah karbon	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		Tidak Program Prioritas	
54	Penyediaan energi listrik dalam rangka pemenuhan kebutuhan listrik rumah tangga miskin sebanyak 8.745 (delapan ribu tujuh ratus empat puluh lima) kepala keluarga dan dukungan terhadap pelaksanaan sistem pertanian terintegrasi sebanyak 7 (tujuh) unit pembangkit listrik tenaga surya.	DINAS PERINDUSTRIAN,PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL		Program Prioritas peningkatan kesempatan kerja dan berusaha melalui penyediaan lapangan pekerjaan	

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari laporan program prioritas adalah sebagai berikut:

1. Pada laporan Juli 2023 progress laporan delapan program prioritas hanya mencapai 4 (empat) laporan program prioritas
2. Pada laporan September 2023 progres laporan delapan program prioritas sudah mencapai 95%
3. Realisasi keuangan pada Juli 2023 berjumlah 29.86% sedangkan di bulan September pencapaian realisasi keuangan berjumlah 561.30%, artinya ada peningkatan pencapaian realisasinya secara administrasi melalui pelaporan.
4. Realisasi fisik pada Juli 2023 berjumlah 243.85% sedangkan pada bulan September 2023 realisasi fisik mengalami peningkatan sejumlah 670.30%
5. Dari ketercapaian 8 (delapan) program prioritas tersebut terdapat 54 (lima puluh empat) kegiatan strategis yang tersebar di berbagai organisasi perangkat daerah

5.2. Rekomendasi

Dari laporan ketercapaian Delapan Program Prioritas adapun rekomendasi sebagai berikut:

1. Masing-masing OPD menyampaikan hasil laporan ketercapaian kinerja dalam bidang keuangan secara administrasi kepada Biro Administrasi Pembangunan ataupun melalui aplikasi prp2sumutprov.go.id .
2. Masing-masing OPD menyampaikan hasil laporan ketercapaian kinerja dalam bidang fisik secara administrasi kepada Biro Administrasi Pembangunan ataupun melalui aplikasi prp2sumutprov.go.id.
3. Biro Administrasi Pembangunan PemprovSU mengevaluasi capaian kinerja Semester 1 keuangan dan fisik setiap OPD berkaitan ketercapaian Delapan Program Prioritas.

DAFTAR PUSTAKA

Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara

Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 29 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara

Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 29 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provsu T.A. 2022.

<http://prp2sumut.sumutprov.go.id/>